B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Pendidikan

a. Prioritas Urusan

Terdapat 8 (delapan) Program Prioritas Urusan Pendidikan Tahun 2018 di DKI Jakarta (sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022; halaman VII-18), yaitu :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar 12 Tahun
- Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan
- Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
- Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan

b. Program dan Kegiatan

Program nasional Urusan Pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 90.58%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Program Nasional dan Daerah Urusan Pendidikan

No	Program	
	Nasional	**Provinsi**
1.	Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini
3.	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

No	Program	
	Nasional	**Provinsi**
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
5.	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
7.	Tata Kelola Layanan Pendidikan	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
8.		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
	7	**8**

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 8 program yang dilaksanakan oleh SKPD, UKPD dan UPT Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Program Urusan Pendidikan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
2.	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun	
3.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
6.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan	
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan	
	Jumlah	

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Dari 1226 kegiatan urusan pendidikan yang dapat direalisasikan sebanyak 1170 kegiatan atau 95.43 %.

Tabel 3.5
Realisasi Program Urusan Pendidikan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	50	40	80.00
2.	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun	147	146	99.32
3.	Program Pendidikan Khusus dan			

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
	Layanan Khusus			
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	49	48	97.96
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	426	411	96.48
6.	Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	226	213	80.00
7.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan			
8.	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Pendidikan	9	6	66.67
	Total	**907**	**864**	**95.26**

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian SPM dalam Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini terdapat pencapaian yang melebihi 100 % dikarenakan terdapat siswa yang berasal dari luar daerah.

Tabel 3.6
Indikator SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator SPM	Target 2018		Capaian			
		Volume	Satuan	2015	2016	2017	2018
1.	**Angka Partisipasi Kasar (APK) dan APM**						
	a. APK SD	113.4	Persen	104.82	104.55	103.99	104.97
	APM SD	95.36	Persen	95.54	95.38	96.15	96.06
	b. APK SMP	115.5	Persen	103.9	109.01	108.19	105.40
	APM SMP	95.80	Persen	93.52	95.8	84.79	83.27
	c. APK SMA / SMK	97.00	Persen	86.54	91.36	97.25	103.69
	APM SMA/SMK	67.91	Persen	64.32	67.91	71.87	76.83
2.	**Jumlah sekolah yang sudah SSN/RSBI/SBI**						
	a. SD	0	Sekolah	117	-	-	0
	b. SMP	0	Sekolah	106	-	-	0
	c. SMA	0	Sekolah	15	-	-	0

No.	Indikator SPM	Target 2018		Capaian			
		Volume	Satuan	2015	2016	2017	2018
	d. SMK	0	Sekolah	15	-	-	0
3.	**Angka putus sekolah**						
	- SD	0	Persen	138	2089	982	0
	- SMP	0	Persen	399	1377	1080	0
	- SMA/SMK	0,05	Persen	1322	3214	3296	0.01
4.	**Angka kelulusan**						
	- SD	100	Persen	99.32	100.00	100.00	100.00
	- SMP	100	Persen	99.99	99.98	99.99	99.99
	- SMA	100	Persen	99.99	100.00	100.00	99.99
	- SMK	100	Persen	99.98	99.99	100.00	99.99
5.	**Rata-rata nilai UAN**						
	- SD (USBD)	8.00	Rerata	7.15	7.01	6.00	63.4
	- SMP	8.00	Rerata	7.48	6.23	6.49	59.5
	- SMA	8.00	Rerata	6.94	6.06	6.49	63.7
	- SMK	8.00	Rerata	6.56	6.37	5.68	57.1
6.	**Rata-rata lama sekolah**	11,55 taun	Tahun	11,98 tahun	11.58 Tahun	10.88 Tahun	10,93 tahun
7.	**Jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO9001:2000**						
	- SD	-	Persen	5	-	-	3
	- SMP	-	Persen	12	-	-	11
	- SMA	-	Persen	37.73	-	-	23
	- SMK	-	Persen	85.71	-	-	31
8.	**Jumlah Sekolah berstandar Nasional (SSN)**						
	- SD	-	Sekolah	109	-	-	109
	- SMP	-	Sekolah	91	-	-	86
	- SMA	-	Sekolah	15	-	-	15

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Capaian kinerja lainnya :

- SOP yang sudah dimiliki dalam urusan pendidikan antara lain :
  1. SOP Legalisir Ijazah
  2. SOP Pengesahan KTSP

3. SOP Mutasi Masuk
4. SOP Mutasi Keluar
5. SOP Penambahan kompetensi keahlian
6. SOP Surat Masuk
7. SOP tentang tatacara Penerimaan Siswa Baru
8. SOP tentang Biaya Operasional Pendidikan
9. SOP Ujian Nasional
10. SOP tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

- Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 3.417 sedangkan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI sebanyak 3.509 orang.
- Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS sebanyak 1.218 dari jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS sebanyak 1.265 orang.
- Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA sebanyak 779 dan jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/M sebanyak 785 orang.
- Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 19.438 dan jumlah Guru jenjang SD/MI sebanyak 20.875 orang.
- Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 11.460 dan Jumlah Guru jenjang SMP/MTS sebanyak 11.975 orang.
- Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 11.731 (SMA = 6462 orang dan SMK = 5269 orang) dan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 12.763 (SMA = 6892 dan SMK = 5871). Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki peta penjaminan mutu pendidikan.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan serta UKPD/UPT di bawah dinas tersebut, dengan jumlah pegawai sebanyak 56.242 orang termasuk Guru dari total jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 72.716. Bahkan jumlah jabatan fungsional terbanyak pun adalah guru yang mencapai 30.308 orang.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pendidikan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**148**	
	• Golongan IV	8	
	• Golongan III	72	
	• Golongan II	60	
	• Golongan I	8	
B.	**Eselon**	**33824**	
	• Eselon I	0	
	• Eselon II	2	
	• Eselon III	28	
	• Eselon IV	275	
	• Eselon V	-	
	• Fungsional	30308	
	• Staf	3211	
C.	**Pendidikan**	**3.174**	
	• S3	0	
	• S2	18	
	• S1	111	
	• Diploma	30	
	• SLTA	135	
	• SLTP	19	
	• SD	0	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2017

Dari 301 jabatan struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2018 sebanyak 301 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Urusan Pendidikan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	2	2	2	2	2
2	Eselon III	28	28	28	7	28
3	Eselon IV	275	275	275	44	275
	Jumlah	301	301	301	112	301

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 301 / 301 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 112 / 301 = 37,20 %
- Kepangkatan : 301 / 301 = 100,00 %

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pendidikan tersebar di SKPD/UKPD tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten serta UPT pada Tahun 2018 anggaran urusan pendidikan sebesar Rp 15,458,145,865,091.

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN	15,458,145,865,091	13,819,836,385,380	89.40%
1. Belanja tidak langsung	8.991.224.626.000	8,340,173,283,998	92.76%
2. Belanja langsung	3,551,861,719,920	2,852,076,880,241	80.30%
a. Belanja pegawai	0	0	0 %
b. Belanja barang dan jasa	1.733.503.408.667	1.156.989.855.013	
Belanja pemeliharaan	998.885.860.606	998.885.860.606	
c. Belanja modal	2.682.157.074.947	2.381.929.752.000	
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	-
• Alokasi anggaran urusan : Belanja APBD	15,374,092,396,917	47,124,824,650,369	32.62%
• Belanja modal : belanja urusan	867,178,972,530	15,374,092,396,917	5.64%
• Belanja pemeliharaan : belanja barang & jasa	591,767,191,475	2,604,702,994,890	22.71%
• Belanja pemeliharaan : belanja urusan	591,767,191,475	15,374,092,396,917	3.84%

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Pendidikan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pendidikan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	2	3	1	3	3	3	3	-	16
2.	Kotak Pengaduan	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3.	Media Masa	-	-	-	-	2	-	-	-	2
4.	E-mail	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.	Website	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

- Website : http://disdikdki.go.id
- E-mail : disdikprogram@yahoo.com

Jumlah sarana Pendidikan tingkat SD sampai dengan SLTA beserta komponen lainnya yang ada di DKI Jakarta sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Jumlah Sekolah, Siswa dan GuruTahun 2018

No	Uraian		Tingkatan Sekolah					Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	PLB	
1	**Jml Sekolah**	**2.312**	**2.579**	**1.150**	**1.037**	**579**	**85**	**7.163**
	- Negeri	18	1584	321	180	63	8	**2.111**
	- Swasta	2294	995	829	857	516	77	**5.052**
2	**Jumlah Siswa**	**132.333**	**800.944**	**381.204**	**171.640**	**219.301**	**5.597**	**1.573.089**
	- Negeri	2.912	575.405	218.916	88.319	45.563	1.567	**928.203**
	- Swasta	129.421	225.309	162.288	83.321	173.738	4030	**644.886**
3	**Jumlah Guru**	**8.049**	**37.775**	**18.204**	**10.876**	**10.129**	**4.912**	**76.984**
	- Negeri	251	24.582	10.043	5.282	2.895	296	**42.802**
	- Swasta	7.798	13.193	8.161	5.594	7.234	4.616	**34.182**

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengelola aset berupa tanah yang terdiri dari :

1)	DINAS PENDIDIKAN	:	1
2)	PPMS	:	1
3)	P2KGK Budi Utomo	:	1
4)	P2KGK Jakarta Barat	:	1
5)	P2KGK Lenteng Agung	:	1
6)	P2KGK Pulogadung	:	1
7)	P2KGK Duren Sawit	:	1
8)	P3PAUDNI	:	1
9)	Gedung TK	:	9
10)	Gedung SD	:	1,232
11)	Gedung SLTP	:	289
12)	Gedug SMA	:	117
13)	Gedung SMK	:	63
	Jumlah	:	1,718

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Pendidikan sebagian besar merupakan *top down* karena melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah. Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan, yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP) dan daerah (RPJMD/RKPD) dan kebutuhan nyata di lapangan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/rencana kerja (Renja) SKPD. Namun demikian terdapat pula perencanaan yang berasal dari *bottom up*, seperti usulan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Tabel 3.12
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Pendidikan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	8	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	8	RKA : RENJA SKPD	100
3	DPA 2018	8	DPA : RKA	100
4	RKPD 2018	8		

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

h. Permasalahan dan solusi

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta antara lain :

Permasalahan pada Urusan Pendidikan antara lain :

1. Permasalahan di bidang sarana dan prasarana antara lain:
   a. Jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan di SLB masih kurang mencukupi
   b. Sarana di SLB dan Inklusi belum mendukung aksesabilitas peserta didik disabilitas
   c. Kurangnya alat bantu dan media pendidikan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan SLB
2. Permasalahan bidang PTK antara lain:
   a. Tempat untuk penyimpanan berkas usulan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru yang sangat terbatas
   b. Honor untuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang tidak diperbolehkan, sehingga sulit untuk menuntut tim penilai menyelesaikan penilaian tepat waktu
   c. Sangat sulit untuk mendapatkan data guru yang valid
   d. Masih banyak guru yang mengurus langsung urusan administrasi kepegawaian ke Disdik/ Sudindik, sehingga meninggalkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
   e. Printer, tinta printer dan kertas yang diberikan masing sangat kurang
   f. Banyak tugas bid. PTK yang berkaitan dengan menggunggah dan mengunduh data yang size file nya besar tetapi kecepatan internetnya masih kurang memadai

g. Banyak surat yang tidak terkait langsung dengan bidang PTK, di-disposisikan ke bidang PTK, misal Penertiban PKL, pemotongan hewan qurban, dugaan pemahalan harga pada proses lelang.
h. Kurangnya komputer untuk digunakan bekerja
i. Tidak adanya database kepegawaian
j. Tidak adanya aplikasi pengolah database kepegawaian yang terintegrasi dari sekolah hingga tingkat Dinas

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikutsertakan guru-guru dalam program pelatihan pengelolaan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di P2KPTK2.
2. Berkoordinasi dengan bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan untuk segera melengkapi sekolah-sekolah untuk penyediaan aksesibilitas peserta didik disabilitas
3. Menyediakan alat bantu dan media pendidikan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan SLB

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/Peraturan lain yang berkaitan dengan urusan Pendidikan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13
Peraturan Daerah dan Peratutan Gubernur Urusan Pendidikan

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.		Perda No.8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 ttg Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Sekolah Negeri
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi	Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 ttg BOP Sekolah Negeri/Madrasah Negeri

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
	Perangkat Daerah	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan RKAS/M
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016 ttg OTK SMKN Mandiri
6	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 ttg Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu
7	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 ttg Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui KJP
8	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 ttg BOP Sekolah Negeri/Madrasan Negeri
9	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 ttg OTK Dinas Pendidikan
10	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 ttg OTK SLBN
		Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 ttg OTK PPKPTKK
		Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 ttg OTK SMPN
		Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 ttg OTK TKN
		Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 ttg OTK SDN
		Peraturan Gubernur Nomor 373 Tahun 2016 ttg OTK PPPPAUD dan Dikmas
		Peraturan Gubernur Nomor 374 Tahun 2016 ttg OTK SMPN/SMAN Ragunan
		Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 ttg OTK PKBMN
		Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 ttg OTK SMAN
		Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 ttg OTK SMKN
		Peraturan Gubernur Nomor 378 Tahun 2016 ttg OTK SMANU MHT
		Peraturan Gubernur Nomor 379 Tahun 2016 ttg OTK Pusdatikomdik
		Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 ttg OTK PPPPOP
		Peraturan Gubernur Nomor 381 Tahun 2016 ttg OTK SMKN Mandiri

Dalam pelayanan masyarakat bidang pendidikan telah dilakukan peningkatan pelayanan, antara lain :

- Sistem penerimaan siswa baru SMA/SMK Negeri menggunakan teknologi informasi dengan sistem *Real Time Online*, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2005 tentang Sistem PSB SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
- Sistem Administrasi Sekolah (SAS) online
- *Short Masage Service* (SMS) Pelayanan Informasi Pendidikan, yaitu sebagai sarana komunikasi timbal balik antara orang tua siswa dengan sekolah.
- Publikasi berita disdik dengan alamat website disdik.jakarta.go.id
- Radio Pendidikan DKI Jakarta dengan alamat website radiodisdik.caster.fm

Prestasi Daerah di Bidang Pendidikan

Prestasi Provinsi DKI Jakarta di Bidang pendidikan antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.14
Prestasi Daerah di Bidang Pendidikan Tahun 2018

No.	Jenis Lomba	Juara
1	Jenjang SMP	
	a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)	1,2,3
	b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	1,2,3
	c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1
2	Jenjang SMA	
	a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)	1,2,3
	b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	1,2,3
	c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	1
	d. OPSI	
	e. Moscow Academic Competition	1,2,3
3	Jenjang SD	
	Festival/Lomba Literasi /Sinopsis PKLK	1
	OSN /Matematika SD	1

No.	Jenis Lomba	Juara
	OSN /Matematika SD	1
	OSN /Matematika SD	1
	OSN /IPA SD	1
	OSN /Matematika SD	2
	OSN /IPA SD	2
	OSN /IPA SD	2
	OSN /Matematika SD	2
	OSN /Matematika SD	3
	OSN /IPA SD	3
	OSN /IPA SD	3
	OSN /IPA SD	3
	O2SN /Pencak Silat (Pa) SD	1
	O2SN /Pencak Silat (Pi) SD	1
	O2SN /Karate (Pi) SD	1
	O2SN /Renang SD	2
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Kids Atletik SD	3
	O2SN /Bulutangkis SD	3
	O2SN /Karate (Pa) SD	3
	Lomba Tata Kelola BOS SD	1
	FLS2N /Baca Puisi SDLB PKLK	1
	FLS2N /Design Grafis SMALB PKLK	1
	FLS2N PKLK /Pantomim SMPLB/SMALB PKLK	1
	FLS2N PKLK /Menyanyi Solo SDLB PKLK	2
	FLS2N PKLK /Melukis SDLB PKLK	2
	FLS2N PKLK /Design Grafis SMPLB PKLK	3
	FLS2N /Pidato Bahasa Indonesia SD	3
	Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI)/Stand Kreatif PKLK	1
	LKSN PKLK/Tata Rias Kecantikan	2

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, 2018

2. Kesehatan

a. Prioritas Urusan

Capaian Indikator Kinerja Program Unggulan

a) Program Kesehatan Masyarakat,Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Upaya Perbaikan Gizi.
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Pengelolaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PPSM)
- Pembinaan dan Pelantikan Saka Bhakti Husada Tingkat Daerah
- Pelaksanaan, Advokasi dan Pengembangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengembangan Promosi Kesehatan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit TB
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit DBD
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (ISP)
- Pengembangan Wawasan Petugas Kebugaran
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Layanan Kegawatdarutan Maternal Neonatal di Rumah Sakit
- Pengembangan Wawasan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengembangan Wawasan Operator Depo Air Minum (DAM)
- Pengembangan Wawasan Petugas Kesehatan Lingkungan tentang Higiene Sanitasi Pangan (HSP)
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Imunisasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Surveilans Campak, AFP, PD3I dan Penyakit Lainnya
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Kematian
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Investigasi Rumor KLB / Potensial KLB / KLB

- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaran Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Laboratorium
- Pelaksanaan Deteksi Wabah dan Pengembangan Kemampuan Surveilans melalui Dukungan Teknologi Informasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Rumah Sakit
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Surevilans Penyakit berbasis Komunitas
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaranaan Pelayanan KB Pasca Persalinan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan Masyarakat
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengkajian Kasus Maternal Perinatal.
- Rujukan UKM Tersier DAK

b) Program Pembinaan Upaya Kesehatan
   - Pelaksanaan Layanan Kesehatan di RSUD Cipayung

- Pelaksanaan Layanan Kesehatan di RSUD Kebayoran Lama.
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
- Penilaian Inovasi dan Produktivitas Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi dan Nasional
- Penilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana
- Penerapan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Pelaksanaan Layanan Kesehatan terkait Even Nasional dan Internasional serta Antisipasi Kejadian Kegawatdaruratan
- Pelaksanaan Piket Siaga Pusat Pengendalian dan Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) Tingkat Provinsi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan Penunjang
- Pelaksanaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta
- Pengembangan Wawasan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Layanan Kesehatan
- Pelaksanaan Assesment Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksanaan Evaluasi, Analisa dan Pengembangan Data Kesehatan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi

- Pelaksanaan Forum Komunikasi Kehumasan Bidang Kesehatan
- Pengembangan Kompetensi Petugas Kesehatan Haji
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Pengelolaan serta Standar Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Umum
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Pelaksanaan Layanan Kesehatan terkait Even Asian Games dan Asian Para Games

c) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar di Layanan Kesehatan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Penggunaan Obat Generik di Layanan Kesehatan
- Penyimpanan dan Pendistribusian Obat ARV
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Standar Penyalur Alat Kesehatan
- Pengembangan Wawasan Petugas Surveilans Alat Kesehatan
- Pengembangan Wawasan Penyalur Alat Kesehatan

d) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
- Pengembangan Wawasan Peserta Program Internsip Dokter Indonesia

- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Program Internsip Dokter Indonesia
- Pengembangan Wawasan Institusi Penghasil, Pengguna maupun Pengelola SDM Kesehatan tentang Hukum dan / atau Kebijakan terkait Pengelolaan SDM Kesehatan
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Praktek Lapangan, Penelitian dan Kerja Sama Lainnya dengan Institusi Pendidikan
- Pengembangan Wawasan Petugas tentang Sistem Informasi SDM Kesehatan
- Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi
- Pelatihan Lead auditor
- Pelatihan Manajemen Risiko
- Pelatihan Public Speaking
- Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP
- Pelatihan Jabfung Sanitarian
- Pelatihan Jabfung Pembimbing Kesja
- Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu

e) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
- Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah
- Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Pelaksanaan Validasi dan Rekonsiliasi Data Kepesertaan PBI Daerah
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Jaminan Kesehatan

f) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan

- Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan
- Pembahasan & Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMD Bidang Kesehatan & Renstra 2018-2022
- Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah
- Penyusunan NSPK Terkait SPM Bidang Kesehatan
- Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor
- Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
- Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pengembangan Wawasan Perencana
- Penyediaan BBM Alat-alat Berat
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penerapan PPK – BLUD
- Penyediaan Peralatan Kantor
- Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2022
- Pelaksanaan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan
- Dukungan Manajemen (DAK)

g) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan

- Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
- Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor

b. Program dan kegiatan

Program Nasional Urusan Kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan Program Nasional dan Provinsi
Urusan Kesehatan

No	PROGRAM / KEGIATAN	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat/KIS)	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
2	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan .	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
3	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM)	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan.
5	Program Pembinaan Upaya Kesehatan.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan
6	Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan.
7	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.	Program Pengelolaan Kendaraan Ooperasional Urusan Kesehatan.
8	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.	
9	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kesehatan	
Jml	**9**	**7**

Sumber : Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta, 2018

Urusan Kesehatan Tahun 2018 sebanyak 7 program dan 205 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16
Program Urusan Kesehatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.	40
2.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	99
3.	Proggram Kefarmasian dan Alat Kesehatan	7
4.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	15
5.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	5
6.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan	36
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan	3
	Jumlah	205

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Beberapa indikator pencapaian Urusan Kesehatan Tahun 2018 antara lain :

Realisasi Program dan Kegiatan.

Tabel 3.17
Realisasi Program Urusan Kesehatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.	40	40	100 %
2.	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	99	99	100 %
3.	Proggram Kefarmasian dan Alat Kesehatan	7	7	100 %
4.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	15	15	100 %
5.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	5	5	100 %
6.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan	36	36	100%
7.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan	3	3	100 %
	Jumlah	205	205	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Indikator SPM

Dilhat dari indikator SPM ini, kinerja urusan Kesehatan secara keseluruhan naik.

Tabel 3.18
Indikator SPM Kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
		2018	2017	2018
1	Cangkupan Kunjungan Ibu Hamil K4	100,00%	98.28%	**98.78%**
2	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani (cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani)	100,00%	91.91%	**93.19%**
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00%	98.32%	**98.54%**
4	Cakupan ibu nifas	100,00%	97.01%	**97.24%**
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	100,00%	86.96%	**88.50%**
6	Cakupan kunjungan bayi	100,00%	99.59%	**99.90%**
7	Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00%	100.00%	**100.00%**
8	Cakupan pelayanan anak balita	100,00%	94.04%	**94.24%**
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin	100,00%	82.71%	**94.73%**
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00%	100.00%	**100.00%**
11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100,00%	96.05%	**94.32%**
12	Cakupan peserta KB aktif	100,00%	84.16%	**80.30%**
13	Penemuan dan penanganan penderita penyakit			
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th (≥2)	≥ 2	2.29	**2.7**
	b. Penemuan penderita pneumonia balita	100,00%	100.00%	**97.59%**
	c. Penemuan penderita baru TB BTA Positif	100,00%	113.83%	**107.00%**
	d. Penderita DBD yang ditangani	100,00%	100.00%	**100.00%**
	e. Penemuan Penderita Diare	100,00%	122.68%	**97.55%**
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin (GAKIN) / masyarakat miskin	100,00%	265.67%	**117.15%**
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien keluarga miskin / masyarakat miskin	100,00%	24.26%	**14.33%**
16	Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS	100,00%	100.00%	**100.00%**
17	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00%	100.00%	**100.00%**
18	Cakupan kelurahan Siaga aktif	100,00%	100.00%	**100.00%**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Kegiatan pelayanan kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan dan UKPD lainnya, seperti Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas dan UPT lainnya, dengan jumlah pegawai (PNS) sebanyak 5176 orang (tidak termasuk RS Cengkareng, RS Budhi Asih, RS Koja, RS Pasar Rebo, RS Tarakan, RS Duren Sawit, dan RS Pasar Minggu). Adapun komposisi komposisi profesi di Puskesmas sebagai berikut :

Tabel 3.19
Kualifikasi Teknis/Fungsional Pegawai Dinas Kesehatan

NO	KUALIFIKASI	JML
	FUNGSIONAL TERTENTU	**3352**
1	Dokter	597
2	Dokter Gigi	352
3	Dokter Spesialis	138
4	Apoteker	59
5	Kesehatan Masyarakat	13
6	Perawat Ahli	189
7	Perawat Terampil	918
8	Bidan	565
9	Perawat Gigi	115
10	Asisten Apoteker	114
11	Arsiparis	-
12	Radiografer	27
13	Nutrisionis	72
14	Sanitarian	91
15	Pranata Lab	77
16	Rekam Medis	6
17	Tekhniker gigi	1
18	Fisioterapis	11
19	Elektromedik	3
20	Epidemiolog	1
21	Refraksionis	3

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.20 Rekapitulasi Pegawai Dinas Kesehatan

No.	Kualifikasi	Jml
A.	**Golongan**	**1.331**
	Gol. IV	193
	Gol. III	672

No.	Kualifikasi	Jml
	Gol. II	431
	Gol. I	35
B.	**Eselon**	**52**
	Eselon I	-
	Eselon II	7
	Eselon III	45
	Eselon IV	-
	Eselon V	-
	Fungsional Umum	402
	Pelaksana	877
C.	**Pendidikan**	**1.331**
	S3	-
	S2	206
	S1	321
	Diploma	587
	SLTA	206
	SLTP	10
	SD	1

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Dari jumlah 319 jabatan yang ada, jabatan yang terisi sampai akhir Desember 2018 sebanyak 291 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Urusan Kesehatan

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	**11**	**10**	10	10	10
2	Eselon III	**140**	**120**	120	119	120
3	Eselon IV	**168**	**161**	161	158	161
	Jumlah	**319**	**291**	291	287	291

Sumber : Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 291 / 291 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 287 / 291 = 98,6 %
- Kepangkatan : 291 / 291 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan dibawah ini termasuk RSUD/RSKD (kecuali RS Kepulauan Seribu), Suku Dinas, Puskesmas dan UPT Kesehatan.

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KESEHATAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.932.907.669.000	1.873.697.704.839	96,94
2. BELANJA LANGSUNG			
a. BELANJA PEGAWAI	2.431.429.100.089	2.192.552.633.766	90.18
b. BELANJA BARANG DAN JASA	2.127.790.460.609	1.694.160.846.658	79.62
BELANJA PEMELIHARAAN			
c. BELANJA MODAL	1.203.497.401.795	897.770.835.274	74.60
CATATAN PERBANDINGAN			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	1.961.665.154.900	61.821.923.000.480	14,36
• BELANJA MODAL : BELANJA URUSAN	1.400.630.070.488	1.877.631.404.912	17,02
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	186.685.552.655	3.094.109.862.390	5,17
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan	186.685.552.655	1.877.631.404.912	2,45

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kesehatan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Barang inventaris yang berupa bidang tanah untuk urusan kesehatan sebagian besar digunakan untuk bangunan Puskesmas, baik Puskesmas Kecamatan maupun Kelurahan.

Tabel 3.23
Bidang Tanah Yang Digunakan untuk Pelaksana Urusan Kesehatan

PERUNTUKAN	JML	NILAI (Rp)	KET
1) Gedung Dinas Kesehatan	4	110.872.055.849.	
2) Gedung Suku Dinas Kesehatan	3	9.351.238.600.	

PERUNTUKAN	JML	NILAI (Rp)	KET
3) Gedung BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	2	32.537.322.653.	
4) Gedung UP. Jaminan Kesehatan Daerah	3	106.557.218.849	
5) Gedung BLUD Akademi Keperawatan (AKPER)	6	81.616.544.370	
6) RSU Kecamatan	1	32.537.322.653	
7) Gudang Obat Dinas Kesehatan	1	119.307.469.031	
8) Gedung BLUD RS Tarakan	1	27.282.010.900	
9) Gedung BLUD RS Cengkareng	23	608,362,442,195	
10) Gedung BLUD RS Pasar Rebo	1	525.706.419.866	
11) Gedung BLUD RS Budhi Asih	1	457.542.310.638	
12) Gedung BLUD RS Duren Sawit	1	246.814.440.989	
13) Gedung BLUD RSUD Kepulauan Seribu	1	97.269.603.056	
14) Gedung BLUD Puskesmas Kecamatan, Puskesmas kelurahan dan Rumah Sakit	1	245.476.280.702	
15) Gudang AGD	1	89.146.093.291	
16) Gudang Obat Dinas Kesehatan	1	584.000.000	
17) Gudang Obat Suku Dinas Kesehatan	2	4.044.449.349	
Jumlah		**3.362.308.058.291**	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.24
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Kesehatan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Prov	JP	JU	JB	JS	JT	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	-	37	48	64	73	61	7	-	290
2.	Kotak Pengaduan	1	75	75	75	91	97	6	-	419
3.	Leaflet	60.000	34.190	30.500	41.108	2.500	45.878	1.650	-	215826
4.	Mobil Keliling	1	13	8	14	19	8	0	-	62
5.	Media Masa	0	6	0	0	6	62	6	-	80
6.	Website	0	10	5	8	11	20	6	-	60
7.	E-mail	2	23	6	9	71	48	6	-	163

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

CATATAN PERBBANDINGAN :

- Website : dinkes.jakarta.go.id
- E-mail : datin.dinkesdki@gmail.com
- Call Center : 021 – 34834872

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan kesehatan merupakan perpaduan *top down* dan *bottom up planning*. Proses perencanaan pembangunan di bidang kesehatan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang. Sebagian urusan kesehatan telah dilimpahkan ke Kelurahan khususnya yang bersifat pembinaan kesehatan.

Tabel 3.25
Sinkronisasi Perencanaan Program Kesehatan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RENJA SKPD 2017	7	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RKA 2017	7	RKA : RENJA SKPD	100
3	DPA 2017	7	DPA : RKA	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

h. Hasil yang diharapkan

Adapun target outcome yang harus dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan pada tahun 2018 adalah :

- Umur Harapan Hidup tahun 2017 adalah 72,55 tahun, capaian Umur Harapan Hidup tahun 2018 adalah 75,6 tahun.
- Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2017 capaian sebesar 100%. Persentase Keluraha Siaga Aktif pada tahun 2018 tidak ada lagi karena tidak terrmasuk Renstra.
- Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2017 sebesar 45,03/100.000 Kelahiran Hidup, capaian Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2018 55,11/100.000 Kelahiran Hidup. Ini adalah angka perhitungan yang diperoleh dari angka perhitungan kasar jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran, yang seharusnya diperoleh dari hasil survey.
- Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 sebesar 2,53/1000 Kelahiran Hidup, tahun 2018 Angka Kematian

Bayi (AKB) 3,13/1000 Kelahiran Hidup. Ini adalah angka perhitungan yang diperoleh dari angka perhitungan kasar jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran, seharusnya diperoleh dari hasil survey

- Jumlah pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan Tahun 2017 sebanyak 30 pasar, tahun 2018 capaian menurun 29 pasar. Pada tahun 2018 tidak ada target karena program prioritas pada RPJMD sudah digantikan dengan program KPLDH
- Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan Tahun 2017 sebanyak 16 rumah susun, capaian tahun 2018 tetap sebanyak 16 rumah susun. Pada tahun 2018 tidak ada target karena program prioritas pada RPJMD sudah digantikan dengan program KPLDH.
- Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan di PPK tingkat I (Puskesmas) sebesar 100%.
- Persentase penderita DBD yang ditangani Tahun 2017 sebesar 100%, capaian tahun 2018 sebesar 100% penduduk dari target sebesar 100% penduduk.
- Persentase penemuan kasus – kasus baru TB Paru BTA Positif , Tahun 2017 sebesar 114,94%, capaian tahun 2018 sebesar 123 % dari target 100%.
- Persentase cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA, Tahun 2017 sebesar 100%, capaian tahun 2018 meningkat sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- Persentase cakupan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017 sebesar 100%, capaian tahun 2018 sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan penyakit tidak menular (PTM) Tahun 2017 sebanyak 44

Puskesmas, capaian tahun 2018 sebesar 44 Puskesmas dari target sebesar 44 Puskesmas.

- Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2017 sebanyak 117 Kelurahan, capaian tahun 2018 meningkat menjadi 229 Kelurahan dari target sebanyak 137 Kelurahan.
- Persentase obat generik yang digunakan oleh Puskesmas Tahun 2017 sebesar 94%, capaian tahun 2018 tidak di hitung karena tidak termasuk Renstra lagi.
- Persentase obat rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah Tahun 2017 sebesar 95,9%, capaian tahun 2018 meningkat sebesar 100% dari target sebesar 100%.
- Jumlah pengujian produk makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran Tahun 2017 sebanyak 15 item, capaian tahun 2018 sebanyak 15 item dari target sebanyak 15 item.
- Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana Tahun 2017 sebesar 15 menit, capaian tahun tahun 2018 sebesar 15 menit dari target sebesar 15 menit.

i. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan tahun 2018 tidak luput dari adanya berbagai permasalahan dan kendala. Berikut permasalahan berikut permasalahan dan kendala dimaksud Pada tahun 2018, permasalahan yang ditemukan antara lain :

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebesar 93,85% dari target 100%.

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidananadalah sebesar 98,54% dari target 100%
3. Angka kematian Ibu masih belum mencapai target, capaian 55,11/100.000 Kelahiran Hidup dari target 30/100.000 Kelahiran hidup.

Solusi

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas solusi yang dilakukan adalah :

1. Solusi untuk permasalahan pertama :
   a. Peningkatan koordinasi dengan fasyankes rujukan.
   b. Melakukan sinkronisasi dan validasi data cakupan setiap bulan
   c. Melakukan sistem pencatatan dan pelaporan KIA dari BPM, RS, dan klinik swasta
2. Solusi untuk permasalahan kedua :
   a. Koordinasi dengan fasyankes untuk dapat melaporkan data persalinanke puskesmas.
   b. Melakukan sistem pencatatan dan pelaporan persalinan dari PMB, RS, dan klinik swasta
   c. Penguatan regulasi KIA termasuk peran serta masyarakat
3. Pencapaian Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang akurat menunggu hasil survey.
4. Perlu kerjasama dengan pengelola rusun, sumber daya, sarana dan prasarana kurang

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kesehatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Peraturan Daerah Urusan Kesehatan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.	Peraturan Menteri Kesehatan No 131/Menkes/SK/10/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
2.	Keputusan Menteri Kesehatan No 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2011 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten / Kota sehat
3.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2011 tentang Eliminasi Malaria
4.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

j. Prestasi Dinas Kesehatan Tingkat Nasional :

1. Lomba Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat Nasional :
   Peringkat Diamond diperoleh 5 Tim
   Peringkat Platinum diperoleh 20 Tim
   Peringkat Gold diperoleh 31 Tim
   Peringkat Silver diperoleh 2 Tim
2. Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2018 :
   Juara Pertama Puskesmas Kecamatan Koja Jakarta Utara

3. Lingkungan Hidup

Tahun 2018 Program Daerah Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.27
Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

No	Program	Jumlah, Kegiatan
I	**Dinas Lingkungan Hidup**	**480**
1.	Program Pengelolaan Persampahan	161
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	106
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup	167
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup	46

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Indikator pencapaian kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 3.28
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

No	Program	Jumlah, Kegiatan	Realisasi	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup	480	470	97.9
Jumlah		480	470	97.9

Sumber : Dinas LH Prov. DKI Jakarta, 2018

Tabel 3.29 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup

No	Jenis Pelayanan	Tahun				Ket
		2015	2016	2017	Sampel Air: 12.822 Sampel Udara: 444	
1	Jumlah Analisa Laboratorium Lingkungan (sampel)	8.540	10613	12.200	750 kegiatan usaha	
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (air limbah)	4.337	5180	-	96 dokumen	
3	Dokumen Amdal yang direkomendasi	127	116	95	666 kegiatan usaha	
4	Dokumen Amdal kegiatan/ usaha yang di awasi implementasinya	120	159		Sampel Air: 12.822 Sampel Udara: 444	

Sumber : Dinas LH Prov. DKI Jakarta, 2018

Hasil kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 lainnya adalah sebagai berikut:

- Hasil pelaksanaan Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor yang dilakukan dari tahun tahun 2013 – 2018 mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.30
Uji Emisi Kendaraan

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	HASIL			
			LULUS	%	TDK LULUS	%
1	2014	16.720	13.902	83	2.463	17
2	2015	9.600	8.562	89	1.038	11
3	2016	11.551	10.232	89	1.319	11
4	2017	13.575	12.023	89	1.552	11

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	HASIL			
			LULUS	%	TDK LULUS	%
5	2018	9.899	9.125	92	774	8
	TOTAL	**61.345**				

Sumber : Dinas LH Prov. DKI Jakarta, 2018

- Pelaksanaan HBKB

  Pelaksanaan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor tingkat provinsi dilaksanakan setiap minggu pada jalan Sudirman – MH. Thamrin dan setiap bulan di lima kota administrasi dimana yang menjadi koordinator adalah Dinas Perhubungan. BPLHD Provinsi maupun Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi melaksanakan pengukuran udara dalam rangka pemulihan kualitas udara.

b. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan yang berada di tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai berikut :

Tabel 3.31
Rekapitulasi Pegawai

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
I	**Dinas LH**		
A.	**Golongan**	**907**	
	1. Golongan IV	67	
	2. Golongan III	409	
	3. Golongan II	390	
	4. Golongan I	41	
B.	**Eselon**	**907**	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	2	
	3. Eselon III	16	
	4. Eselon IV	51	
	5. Fungsional Tertentu	19	Pengendali Dampak Lingkungan Pejabat Pengawas

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
			Lingkungan Hidup (PPLH) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	6. Fungsional Umum	819	
C.	**Pendidikan**	**907**	
	1. S3	-	
	2. S2	79	
	3. S1	235	
	4. Diploma	31	
	5. SLTA	358	
	6. SLTP	113	
	7. SD	91	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2018

Dari jumlah 71 jabatan struktural yang ada, jabatan yang terisi sampai akhir Desember 2018 sebanyak 69 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan :

Tabel 3.32
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
A	**Dinas Lingkungan Hidup**					
1	Eselon II	2	2	2	-	2
2	Eselon III	16	16	16	13	16
3	Eselon IV	53	51	51	41	51
		71	69	69	54	69

Sumber : Dinas LH Prov. DKI Jakarta, 2018

c. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 3.33
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	2,337,381,438,344	1,897,513,855,273	81.18
1. BELANJA TIDAK	276,294,649,000	264,926,301,157	95.89

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	2,061,086,789,344	1,632,587,554,116	79.21
a. BELANJA PEGAWAI	509,540,000	92,400,000	18.13
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1,458,354,631,501	1,214,457,964,750	83.28
- Belanja Pemeliharaan	317,215,346,267	186,026,658,410	58.64
c. BELANJA MODAL	285,007,271,576	232,010,530,956	81.41
CATATAN :	-	-	-
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD	2,337,381,438,344		
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	285,007,271,576	2,061,086,789,344	13.83
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	317,215,346,267	1,458,354,631,501	21.75
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	317,215,346,267	2,061,086,789,344	15.39

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta (belum)

d. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Lingkungan Hidup tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.34 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Lingkungan Hidup

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada BPLHD/Kantor LH							JML
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	
A	**Dinas LH**								
1.	Papan Pengumuman	-	-	1	1	1	1	-	4
2.	Kotak Pengaduan	-	-	1	-	-	1	-	2
3.	Leaflet	1	-	-	-	-	-	-	1
4.	Mobil Keliling	1	-	-	1	-	1	-	3
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	-	-	-	-	-	-	1
8.	Call Center	1	-	-	-	-	-	-	1

Catatan :

Dinas Lingkungan Hidup
- Website : dinaslh@jakarta.go.id
- E-mail : dinaslh@jakarta.go.id
- Call Center : 021-8092744

Beberapa sarana dan prasarana lain yang digunakan dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup antara lain :

No	Jenis Sarana Penanganan Sampah	Jumlah
1	Typer	1.216
2	Compactor	168
3	Arm Roll	310
4	Tronton	36
5	Dump Pickup	66

Data Semester I Tahun 2018

Sarana lainnya adalah:

1. Stasiun Pemantau Kualitas Udara sebanyak 5 unit
2. Mobile Station Pemantau Kualitas Udara sebanyak 3 unit

e. Proses perencanaan Pembangunan

Mengingat lingkungan hidup menyangkut perbagai aspek dan institusi, maka perencanaan dalam urusan lingkungan hidup dilakukan secara terintegrasi antara *bottom up, top down* dan lintas sektoral melalui forum Musrenbang.

Tabel 3.35 Sinkronisasi Perencanaan Program Lingkungan Hidup

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
A	**Dinas LH**			
1	RKPD 2018	4	RKPD : RENJA SKPD	100 %
2	RENJA SKPD 2018	4	RENJA SKPD : RKA	100 %
3	RKA 2018	4	RKA : DPA	100 %
4	DPA 2018	4		

f. Permasalahan dan solusi

- Masih rendahnya komitmen masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup, antara lain tampak dari lingkungan yang kotor, kali penuh dengan sampah dan penggunaan jalur hijau untuk kegiatan usaha atau pemukiman. Untuk itu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan dengan berbagai cara.
- Masih terdapat perusahaan yang kurang memperhatikan

AMDAL. Upaya dilakukan dengan pembinaan, pengawasan, penegakkan hukum dan pemberian penghargaan kepada yang berprestasi.

g. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Lingkungan Hidup yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.36 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Lingkungan Hidup

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
		Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng
		Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan Dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah Di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility
		Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
		Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
		Peraturan Daerah 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan, pada tahun 2002 Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta telah terakreditasi sebagai laboratorium pengujian berdasarkan SMI 17025:2002 dengan nomor LP – 126 IDN.

Penghargaan yang diterima pelaksana Urusan Lingkungan Hidup selama Tahun 2018:

1. Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 9 sekolah
   a. SDN Jelambar 08
   b. SDN Johar Baru 01
   c. SDN Petojo Selatan 01
   d. SDN Pekayon 18
   e. SMPN 68
   f. SMPN 248
   g. SMAN 72
   h. SMKN 60
   i. MAN 16
2. Adiwiyata Mandiri sebanyak 10 sekolah
   a. SDN Cijantung 03
   b. SDN Ciracas 06
   c. SDN Rawa Badak Utara 01
   d. SDN Tanjung Priok 05
   e. SMPN 85
   f. SMPN 173
   g. SMAN 23
   h. SMAN 42
   i. SMAN 78
   j. SMAN 110
3. Program Kampung Iklim (Proklim) Utama (Tk. Nasional) sebanyak 2 RW
   a. RW 03 Malaka Sari
   b. RW 04 Pulau Pramuka

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.37
Program dan Jumlah Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Jumlah Kegiatan	Ket
1.	**Dinas Bina Marga**	**206**	
	a. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	53	
	b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	70	
	c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	
	d. Program Peningkatan dan	56	

No	Program	Jumlah Kegiatan	Ket
	Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum		
	e. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum	24	
2.	**Dinas Sumber Daya Air**	**174**	
	a. Program Pengendalian Banjir	65	
	b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	13	
	c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	12	
	d. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air	84	
	e. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air	3	
3.	**Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**	62	
	Program Penataan Ruang	17	
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	20	
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penataan Ruang	22	
	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kantor Urusan Penataan Ruang	3	
	JUMLAH	**442**	

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2018

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Adapun hasil yang dicapai pada Tahun 2018 antara lain :

Tabel 3.38
Program, Jumlah Kegiatan dan Realisasi
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Dinas Bina Marga	206	192	93,20
2.	Dinas Sumber Daya Air	174	170	97.70
3.	Dinas Cipta Karya	62	60	96,77
Jumlah				

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2018

Tabel 3.39 Rekapitulasi Pegawai Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kualifikasi	SKPD (Dinas)			Jumlah
		DSDA	DCK	DBM	
A.	**Golongan**	**449**	**556**	**343**	**1348**
	1. Golongan IV	29	45	24	98
	2. Golongan III	217	425	241	883
	3. Golongan II	187	85	78	350
	4. Golongan I	16	1	-	17
B.	**Eselon**	**449**	**556**	**343**	**1348**
	1. Eselon I	-	-	-	-
	2. Eselon II	1	1	1	3
	3. Eselon III	15	14	13	42
	4. Eselon IV	43	87	38	168
	5. Eselon V	-	-	-	-
	6. Fungssional	-	-	291	291
	5. Pelaksana	390	**454**	-	844
C.	**Pendidikan**	**449**	**556**	**343**	**1348**
	1. S3	-	-	-	-
	2. S2	46	57	34	137
	3. S1	146	297	149	592
	4. Diploma	9	33	14	56
	5. SLTA	203	164	130	497
	6. SLTP	32	2	7	41
	7. SD	13	3	9	25

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan :

Tabel 3.40
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Jumlah Pejabat Sesuai		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	**Dinas Bina Marga**	**52**	**52**	**50**	**14**	**50**
	1. Eselon II	1	1	1	-	1
	2. Eselon III	13	13	13	4	13
	3. Eselon IV	38	38	38	10	38
2	**Dinas Sumber Daya Air**	59	59	59	17	47
	1. Eselon II	1	1	1	-	1
	2. Eselon III	15	15	15	3	11
	3. Eselon IV	43	43	43	14	35
3	**Dinas Cipta Karya**	**105**	**102**	**102**	**74**	**102**
	1. Eselon II	1	1	1	1	1
	2. Eselon III	14	14	14	12	14
	3. Esselon IV	90	87	87	61	87

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2017

b. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan anggaran Urusan Pekerjaan Umum tersebar pada beberapa SKPD sebagai berikut.

Tabel 3.41
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan PU dan Penataan Ruang

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
URUSAN PEKERJAAN UMUM	9,697,960,178,858	5,346,638,598,165	55.13%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	259,457,153,406	251,352,695,339	96.88%
2. BELANJA LANGSUNG	9,438,503,025,452	5,095,285,902,826	53.98%
a. BELANJA PEGAWAI	43,815,127,500	27,036,215,210	61.71%
b. BELANJA BARANG DAN JASA	2,262,636,906,987	1,280,826,245,294	56.61%
- Belanja Pemeliharaan	1,945,824,761,106	1,169,658,486,733	60.11%
c. BELANJA MODAL	7,132,050,990,965	3,787,423,442,322	53.10%
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	#DIV/0!
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	9,697,960,178,858	59,685,552,609,233	
• Belanja Modal : Belanja URUSAN	7,132,050,990,965	9,697,960,178,858	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang&Jas	1,945,824,761,106	2,262,636,906,987	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1,945,824,761,106	9,697,960,178,858	

Sumber : LKPD 2017 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

Anggaran tersebut merupakan gabungan dari anggaran 3 SKPD sebagai berikut.

Tabel 3.42
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada SKPD Urusan PU dan Penataan Ruang

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A. DINAS BINA MARGA	**3,632,258,670,326**	**3,274,646,941,762**	**90.15%**
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	133,424,110,000	122,824,065,051	92.06%
2. BELANJA LANGSUNG	**3,498,834,460,326**	**3,151,822,876,711**	**90.08%**
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1,209,952,994,525	1,037,454,040,264	86.31%
- Belanja Pemeliharaan		906,025,216,239	
c. BELANJA MODAL	2,288,881,465,801	2,114,368,836,447	92.44%
CATATAN PERBANDINGAN :	-	-	-
• Alokasi Anggaran SKPD : Belanja APBD	**3,632,258,570,326**		

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
• Belanja Modal : Belanja SKPD	2,288,881,465,801	**3,274,646,941,762**	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	906,025,216,239	1,037,454,040,264	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja SKPD	906,025,216,239	**3,274,646,941,762**	
B. DINAS SDA			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	168.086.390.000	139.649.612.526	83.08
2. BELANJA LANGSUNG	4.267.958.752.492	2.595.392.836.514	60.81
a. BELANJA PEGAWAI	91.356.818	78.584.089	86.02
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1.042.442.660.260	656.854.459.729	63.01
- Belanja Pemeliharaan	519.116.008.078	287.779.510.404	55.44
c. BELANJA MODAL	3.225.424.735.414	1.842.935.753.320	61.65
CATATAN PERBANDINGAN :			
• Alokasi Anggaran SKPD : Belanja			
• Belanja Modal : Belanja SKPD			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja SKPD			
C. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANGDAN PERTANAHAN			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	210.797.951.000	202.268.180.321	95,95
2. BELANJA LANGSUNG	270.302.157.000	155.736.874.405	57,62
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	-
b. BELANJA BARANG DAN JASA	88.218.880.838	72.215.647.105	81,86
- Belanja Pemeliharaan	2.320.324.021	1.828.318.261	78,80
c. BELANJA MODAL	182.083.276.162	83.519.034.689	45,87
CATATAN PERBANDINGAN : PERBANDINGAN			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	182.083.276.162		
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.320.324.021	88.218.880.838	2,63
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	210.797.951.000	202.268.180.321	95,95

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

c. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perumahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.43
Jenis dan Jumlah Fasilitas / Prasarana Informasi

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas			JML
		DBM	DSDA	DCK	
1.	Papan Pengumuman	1	-	7	1
2.	Kotak Pengaduan	-	-		-
3.	Leaflet	-	-	1	-
4.	Mobil Keliling	-	-		-
5.	Media Masa	3	4		7
6.	Website	1	3	1	2
7.	E-mail	1	2	7	3
8.	Call Center	1	1		2
9	Sms center	-	-	1	-

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2018

Catatan :
a. Dinas Bina Marga :
   - Website : binamargadki.net
   - Email : binamargadkijakarta@gmail.com
   - Call Center : 384-4444
   - Media massa :
     Twitter : @BinaMargaDKI
     Facebook : BinaMargaDKI
     Instagram : @binamargadki

b. Dinas Sumber Daya Air :
   - Website : sumberdayaair.jakarta.go.id
     : portaldatadsda.jakarta.go.id
     : poskobanjirdsda.jakarta.go.id
   - Email : sumberdayaair.jakarta@gmail.com, sumberdayaair@jakarta.go.id
   - Call Center : 021 3843250
   - Media massa :
     Twitter : @DinasSDAJakarta
     Facebook : Dinas Sumber Daya Air Provinsi.DKI Jakarta
     Instagram : @dinas_sda
     Youtube : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
     Jakarta

c. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan :
   Website : dcktrp.jakarta.go.id

d. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum lebih kepada usulan masyarakat melalui forum Musrenbang (*bottom up*), karena merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 3.44
Sinkronisasi Perencanaan Program Pekerjaan Umum

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
A.	**Dinas Bina Marga**			
1	RKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	5	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	5	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	5		
B.	**Dinas SDA**			
1	RKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	5	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	5	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	5		
C	**DCKTRP**			
1	RKPD 2017	4	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	4	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2017	4	RKA : DPA	100
4	DPA 2017	4		

Sumber : Dinas BM, Dinas SDA Tahun 2018

e. Permasalahan dan solusi

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di DKI Jakarta Tahun 2018, antara lain :

1. Dinas Bina Marga :
   a) Pembangunan JPO memerlukan rekomendasi dari Dishub serta membutuhkan pembebasan tanah untuk kaki JPO
   b) Gagal lelang pemeliharaan JPO karena tidak ada penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi
   c) Anggaran perubahan untuk beberapa kegiatan tidak terserap maksimal
2. Dinas Sumber Daya Air
   a) Gagal lelang pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Lancang, Pembatalan Lelang dikarenakan Koreksi Aritmatika hasil koreksi Aritmatika

terjadi kesalahan penjumlahan sehingga dapat mempengaruhi hasil pelelangan

b) Gagal Lelang pada Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Tidung, Pembatalan Lelang dikarenakan Koreksi Aritmatika hasil koreksi Aritmatika terjadi kesalahan penjumlahan sehingga dapat mempengaruhi hasil pelelangan.

c) Pembangunan Infrasytruktur tanggul pantai sistem Aliran Barat realisasi sepanjang 106 meter yang ditargetkan 284 meter dikarenakan :
   1. Keterlambatan pembayaran atas lahan yang menjadi area kerja (terlambat 2 bulan dari kontrak) sehingga jadwal mobilisasi alat ikut terlambat
   2. Ditemukan tanah keras yang menghambat pemancangan dilokasi tersebut (meskipun sudah dilakukan preboring),
   3. pemindahan utilitas tiang travo pln yg memakan waktu,
   4. masalah sosial masyarakat yg tinggi di kamar muara, sehingga pelaksanaan lapangan ikut terhambat

d) Pengadaan tanah sungai/saluran
   Beberapa pengadaan lokasi pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan karena :
   1) belum adanya kesepakatan harga
   2) dokumen tidak lengkap

e) Tidak terlaksananya Studi Pendahuluan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 2, Zona 5 dan Zona 8 Karena Studi akan dilaksanakan dengan bantuan dari KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur).

f) Tidak terlaksananya pengadaan tanah untuk penggantian lahan unit Peralatan dan Perbekalan Dinas Sumber Daya Air karena pengadaan tanah untuk penggantian lahan Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang ada untuk tahapan proses pengadaan tanah dengan batas pengajuan SPM

3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
   a) Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota dan Sulitnya penerapan Rencana Tata Ruang di lapangan
   b) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. DBM :
   a) Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan mengalokasikan kebuthan anggaran pembebasan tanah
   b) Mengusahakan pembiayaan alternatif untuk pemeliharaan JPO menggunakan dana kompensasi pelampauan KLB
2. DSDA
   a) Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Tidung dan Pulau Lancang Perlunya Koreksi Aritmatika Sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam penjumlaha, dan tahun 2019 sudah Sudah di Anggarkan kembali di tahun 2019
   b) Penyiapan lebih awal untuk pembebasan tanah/lahan
   c) Melakukan sosialisai dan pendekatan kepada masyarakat terkait relokasi tempat
   d) Soaialisasi kepada masyarakat terkait pembayaran yang disesuaikan dengan NJOP
   e) Mengevaluasi dan pervikasi terhadap dokumen-dokumen tanah yang diperlukan
3. DCKTRP
   a) Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, Pelaksanaan kebijakan satu peta, pembangunan sistem informasi tata ruang, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
   b) Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar

f) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/Peraturan lain yang berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut

No.	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda / Pergub	Nomor dan Judul Peraturan Daerah/Pergub
1.	Perda Nomor 6 tahun 2017	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.	Perda Nomor 11 tahun 1993	Tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	Perda Nomor 12 Tahun 2014	Organisasi Perangkat Daerah
4.	Perda Nomor 5 Tahun 2016	Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi. DKI Jakarta

Prestasi Daerah yang diterima Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain sebagai berikut :

- Dinas Bina Marga :
  a. Sakip
  b. Keterbukaan informasi publik
- DCKTRP
  a. Bhumandala Award sebagai Simpul Jaringan Geospasial Tingkat Provinsi Terbaik 2018
  b. Sebagai Nominasi Kategori Badan Publik Dinas dalam "Evaluasi dan Pemeringkatan Kerterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018"

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Prioritas Urusan

Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di perkotaan terutama di kota besar seperti Jakarta begitu penting untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pelayanan masyarakat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Seiring kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yaitu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota, maka prioritas pembangunan perumahan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat;
2) Program Penataan Kawasan Permukiman;
3) Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.45
Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Pengembangan Perumahan Rakyat	Penyediaan Perumahan Rakyat
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rakyat	Pelayanan Perumahan dan Permukiman
3	Program peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan Rakyat
Jumlah	3	3

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Pada tahun 2018 terdapat 3 dari 5 program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan daerah.

Tabel 3.46
Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat	66
2.	Pelayanan Penghuni Rumah Susun	9
3.	Pelayanan Penataan Kawasan Permukiman	3
Jumlah		**78**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian hasil-hasil kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.47
Realisasi Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat	66	63	95,45%
2	Pelayanan Penghuni Rumah Susun	9	8	88,88%
3	Pelayanan Penataan Kawasan Permukiman	3	3	100%

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
Jumlah		**78**	**74**	**94,87%**

Sumber : Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Pengelolaan urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang didukung oleh 296 orang pegawai, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.48
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi	Jumlah
1	**2**	**3**
A.	Golongan (Jumlah)	**296**
	1. Golongan IV	51
	2. Golongan III	195
	3. Golongan II	46
	4. Golongan I	4
B	Eselon	**296**
	1. Eselon I	0
	2. Eselon II	0
	3. Eselon III	25
	4. Eselon IV	62
	5. Eselon V	0
	5. Fungsional	0
	6. Staf	209
C	Pendidikan	**296**
	1. S3	1
	2. S2	59
	3. S1	129
	4. Diploma	23
	5. SLTA	78
	6. SLTP	5
	7. SD	1

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2018

Dari 88 Jabatan Struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2018 sebanyak 87 Jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan KP

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	0	-	-	-
2	Eselon III	25	25	25	24	25
3	Eselon IV	62	62	62	39	62
Jumlah		**88**	**87**	**87**	**63**	**87**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 87 / 87 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 63 / 87 = 72,41 %
- Kepangkatan : 87 / 87 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Anggaran Urusan Perumahan	**2.902.112.756.777**	**2.468.468.049.732**	**85,06%**
. BELANJA TIDAK LANGSUNG	129.813.606.000	127.396.915.292	98,14%
2. BELANJA LANGSUNG	2.772.299.150.777	2.341.071.134.440	84,45%
BELANJA PEGAWAI	129.813.606.000	127.396.915.292	98,14%
BELANJA BARANG DAN JASA	185.825.976.383	158.145.937.556	85,10%
Belanja Pemeliharaan	2.210.899.478.386	1.946.805.224.233	88,05%
c. BELANJA MODAL			
CATATAN PERBANDINGAN :	2.902.112.756.777	2.468.468.049.732	85,06%
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	2.210.899.478.386	1.946.805.224.233	88,05%
Belanja Modal : Belanja URUSAN	185.825.976.383	158.145.937.556	85,10%

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.210.899.478.386	1.946.805.224.233	88,05%
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	**2.902.112.756.777**	**2.468.468.049.732**	**85,06%**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Perumahan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.51
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Perumahan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	7
3.	Leaflet	1	1	1	1	1	1	1	7
4.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	7

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Catatan :
Website : -
E-mail : subprogramdprkp@gmail.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun rumah susun di 5 Wilayah Kota Administrasi, sebagai sarana pemukiman yang layak bagi warga Jakarta, yaitu :

- Rusun Susun Nagrak Tower 1-5 terbangun 5 Tower, 1.275 Unit Hunian;
- Rusun Susun Nagrak Tower 6-10 terbangun 5 Tower, 1.275 Unit Hunian;
- Rusun Susun Nagrak Tower 11-14 terbangun 4 Tower, 1.020 Unit Hunian;
- Rusun Susun Jl. Rorotan IV, Kel.Rorotan Kec.Cilincing terbangun 4 Tower, 1.020 Unit Hunian;

- Rusun Susun Kel. Penggilingan, Kec.Cakung terbangun 4 Tower, 1.020 Unit Hunian;
- Rusun Susun Kel. Pulo Gebang, Kec.Pulo Gebang terbangun 1 Tower, 255 Unit Hunian;
- Rumah Susun Polri Pesing terbangun 1 Tower, 255 Unit Hunian;
- Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo terbangun 2 Tower, 346 Unit Hunian;
- Revitalisasi Rusun Penjaringan terbangun 2 Tower, 394 Unit Hunian;
- Rumah Susun Kelurahan Pengadegan terbangun 1 Tower, 188 Unit Hunian;
- Rumah Susun Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4 dan Tower 5 terbangun 3 Tower, 420 Unit Hunian;
- Rumah Susun Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur terbangun 1 Tower, 95 Unit Hunian.

Sementara itu terdapat beberapa lokasi yang disiapkan untuk membangun rumah susun, yaitu :

- Rumah Susun PIK Pulo Gadung Rusun Penggilingan
- Rumah Susun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng
- Revitalisasi Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat
- Rumah Susun Cakung Barat
- Revitalisasi Rusun Penjaringan
- Rumah Susun Padat Karya
- Revitalisasi Rusun Cipinang Besar Utara
- Rumah Susun Pulo Jahe
- Rumah Susun Kel.Kelapa Gading Timur
- Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, sedangkan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan untuk periode 2017-2022.

Tabel 3.52
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Perumahan dan KP

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2017	5	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2017	5	DPA : RKA	100
4	DPA 2017	5		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

h. Permasalahan dan solusi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu bagian dari Bidang Sarana dan Prasarana Kota mempunyai permasalahan yang spesifik sebagai berikut :

Terdapat kendala yang ditemui dalam pencapaian backlog perumahan diantaranya ketersediaan lahan yang semakin sedikit, pelaksanaan kegiatan yang memakan waktu cukup lama mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pembangunan, ketersediaan anggaran daerah yang tidak hanya mencakup pembangunan perumahan, serta kurangnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan penyediaan rumah. Solusi yang diambil adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pemerintah dan juga pembangunan gedung secara mixed use dengan pasar, lokasi binaan (lokbin) dan fungsi lainnya, menggunakan sistem waktu pelaksanaan kegiatan minimal dua tahun (multi years), mengusulkan kegiatan pembangunan ke pemerintah pusat dan juga memanfaatkan kewajiban pengembang/pihak swasta, serta menggunakan dampingan tenaga ahli/staf profesional dalam pelaksanaan kegiatan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri yang berkaitan dengan urusan Perumahan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 3.53
Peraturan Daerah Tentang Perumahan dan KP

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Peraturan Gubernur	Nomor dan Judul Perda/Peraturan Gubernur
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik	Peraturan Daerah No 1 Tahun 1991 Tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 707 tahun 1980 tentang Penyempurnaan Pedoman Penetapan Harga Sewa Perumahan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 2693 Tahun 1987 tentantg Pedoman Pengaturan Perumahan Pemondokan (Rumah Kost) Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun	Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun	Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebeasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanahuntuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan PPRS di Rusunami	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 354 tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Sederhana/Murah Bagi Pemegang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (Sp3l) Di Wilayaj Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Keputusan Gubernur No. 1934/2002

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Peraturan Gubernur	Nomor dan Judul Perda/Peraturan Gubernur
		tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang Dikonversi Dengan Dana Oleh Para Pengembangan Pemegang SIPPT.
3.	Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 Tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun	Instruksi gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 1995 Tentang Pembentukan RT/RW pada Komplek-Komplek Rumah Susun Flat dan yang sejenis
		Keputusan Gubernur Nomor 638 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
		Keputusan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor 1128 Tahun 1998 Tentang Pedoman Pembinaan Dalam Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Di Wilayah DKI Jakarta
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
		Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
		Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun
5.	Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

6. Kepemudaan dan Olahraga

a. Prioritas Urusan

- Meningkatnya sumberdaya aparatur, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang berkualitas dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
- Meningkatnya pemanfaatan iptek keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga.
- Terwujudnya pemuda yang berdaya saing melalui pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan kepemudaan.
- Tersedianya prasarana dan sarana olahraga dan pemuda yang sesuai standar.

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.54
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM	
1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
2	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga
4	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga
Jml	**4**	**4**

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 4 (empat) Program pada Urusan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Dinas Olahraga dan Pemuda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.55
Program Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	33
2.	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	108
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga	21
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga	3
	Jumlah	**165**

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan berdasar pada Undang undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Hasil yang dicapai dalam Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Realisasi kegiatan Tahun 2018 mencapai 72,15 %

Tabel 3.56
Realisasi Program Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	33	5.599.487.500	91,34%
2.	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	108	270.168.726.792	75,94%

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga	21	6.098.757.588	81,20%
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga	3	398.135.015	67,89%
Jumlah		165	282.265.106.895	76,29%

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pemuda dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta UKPD/UP di bawah dinas tersebut, dengan jumlah pegawai sebanyak 274 orang atau 0,42 % dari total jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.57
Rekapitulasi Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda

No	Kualifikasi	Jumlah	Ket
A.	**Golongan**	**274**	
	1. Golongan IV	38	
	2. Golongan III	161	
	3. Golongan II	73	
	4. Golongan I	2	
B.	**Eselon**	**58**	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	16	
	4. Eselon IV	41	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	-	
	7. Pelaksana (Staf)	216	
C.	**Pendidikan**	**274**	
	1. S3	3	
	2. S2	39	

No	Kualifikasi	Jumlah	Ket
	3. S1	115	
	4. Diploma	11	
	5. SLTA	98	
	6. SLTP	2	
	7. SD	6	

Sumber : Dinas Olahraga dan Pemuda, 2018

Dari 58 jabatan struktural yang ada, yang terisi sampai akhir Desember 2018 sebanyak 54 jabatan. Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pemuda dan Olahraga

No.	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	16	16	16	13	16
3	Eselon IV	41	37	37	26	37
Jumlah		**58**	**54**	**54**	**40**	**54**

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 54 / 54 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 40 / 54 = 74,07 %
- Kepangkatan : 54 / 54 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Pagu Anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.59
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda

URAIAN	Alokasi(Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	743.411.884.914	587.147.472.550	78,98%
1. Belanja Tidak Langsung	110.804.838.000	95.839.520.806	86,49%

URAIAN	Alokasi(Rp)	Realisasi (Rp)	%
2. Belanja Langsung	632.607.046.914	491.307.951.744	77,66%
a. Belanja pegawai	120.352.810.000	117.069.052.000	97,27%
Belanja barang dan jasa	372.698.566.227	269.887.255.190	72,41%
Belanja pemeliharaan	139.555.670.687	104.351.644.554	74,77%
c. Belanja modal			
Catatan :	743.411.884.914	587.147.472.550	78,98%
Alokasi Anggaran Urusan: Belanja APBD	139.555.670.687	104.351.644.554	74,77%
Belanja Modal : Belanja Urusan	10.551.553.526	8.093.877.683	76,71%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang&Jasa	10.551.553.526	8.093.877.683	76,71%
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	743.411.884.914	587.147.472.550	78,98%

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

- Sarana Olahraga dan Pemuda

  Sarana yang digunakan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.60
Jenis dan Jumlah Sarana Informasi
Pemuda dan Olahraga

No.	Jenis Fasilitas/ Sarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	GR	GOR	
1.	Papan Pengumuman	1	1	3	3	2	2	31	1	44
2.	Kota Pengaduan	1	1	3	3	1	2	23	1	35
3.	Leaflet	4	-	-	-	-	-	-	-	4
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Media Masa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	1	3	3	2	2	5	1	18
8.	Call Center	1	1	3	3	2	2	5	1	18

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2017

Catatan :
- Website : www.dispora.jakarta.go.id
- E-mail : dispora@jakarta.go.id
- Call Center : 021 – 8193548

- Prasarana Olahraga dan Pemuda

  Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olahraga secara umum sudah merata pada semua kota dan kabupaten, yaitu :

  Unit Pengelola (UP) Gelanggang Remaja di DKI Jakarta sebanyak 36 Unit di 5 Wilayah Kota Administrasi :

  - Unit Pengelola (UP) Gelanggang Remaja Kota Adminstrasi (5 Unit) :
    1. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Pusat
    2. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
    3. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat
    4. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan
    5. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Timur
  - Unit Pengelola (UP) Gelanggang Olahraga (7 Unit) :
    1. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun
    2. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan
    3. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas
    4. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Sunter
    5. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Cendrawasih
    6. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya
    7. Unit Pengelola Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro
  - Unit Pengelola (UP) Gelanggang Remaja Kecamatan (31 Unit):

    Jakarta Pusat
    1. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Cempaka Putih
    2. Unit Pengelola. Gelanggang Remaja Kecamatan

Kemayoran
3. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang
4. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar
5. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Johar Baru

Jakarta Utara

6. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Cilincing
7. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading
8. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Koja
9. Unit Pengelola GelanggangRemaja Kecamatan Tanjung Priok

Jakarta Barat

10. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan KebonJeruk
11. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Grogol Petamburan
12. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah
13. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Kalideres
14. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Kembangan
15. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kecamatan Tambora

Jakarta Selatan

16. Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru
17. Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama
18. Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan
19. Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet
20. Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Prapatan
21. Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu
22. Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa

Jakarta Timur

23. Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas
24. Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayung
25. Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Rebo
26. Gelanggang Remaja Kecamatan Kramat Jati
27. Gelanggang Remaja Kecamatan Makasar
28. Gelanggang Remaja Kecamatan Jatinegara

29. Gelanggang Remaja Kecamatan Duren Sawit
30. Gelanggang Remaja Kecamatan Pulo Gadung
31. Gelanggang Remaja Kecamatan Cakung

- Gedung Olahraga / Fasilitas Lepas (53 Unit)

Jakarta Pusat

1. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Pusat
2. Gedung Olahraga Tenis Meja
3. Gedung Olahraga Kemakmuran
4. Gedung Auditorium Kebon Jahe Jakarta Pusat

Jakarta Utara

5. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Utara
6. Gedung Bulutangkis
7. Gedung Judo Klp. Gading
8. Gedung Serbaguna Semper Barat
9. GOR Kamal Muara
10. Yacth Club (Gedung Serbaguna)

Jakarta Barat

11. Gedung Bulutangkis Cendrawasih
12. Gedung Serbaguna GOR Cendrawasih

Jakarta Selatan

13. Gedung Basket (Hall A) GMSB
14. Gedung Voli (Hall B) GMSB
15. Gedung Bulutangkis (Hall C) GMSB
16. Ruang Tenis Meja GMSB
17. Ruang Fitnes GMSB
18. Gedung Pertunjukan, Gedung B, C, dan D Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
19. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Selatan
20. Fasilitas Gedung Bridge
21. Gedung Bulutangkis PPOP Ragunan
22. Gedung Tenis Meja PPOP Ragunan
23. Gedung Voli PPOP Ragunan
24. Gedung Angkat Besi PPOP Ragunan
25. Gedung Gulat PPOP Ragunan
26. Gedung Judo PPOP Ragunan
27. Gedung Serbaguna (Basket) PPOP Ragunan
28. Gedung Senam PPOP Ragunan

Jakarta Timur

29. Gedung Olahraga (GOR) Jakarta Timur
30. Gelanggang Olahraga PKP
31. Gedung Futsal GOR Rawamangun
32. Gedung Badminton GOR Rawamangun
33. Gedung Squash GOR Rawamangun
34. Gedung Voli Pondok Bambu
35. Gedung Senam Radin Inten
36. Gedung Serba Guna Radin Inten

37. GOR Perumnas Klender
38. Gedung Olahraga (GOR) Ciracas
39. Gedung Teater Terbuka

Fasilitas Lepas : 11

Jakarta Pusat

1. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
2. Kolam Renang Kebon Jahe Tanah Abang

Jakarta Utara

3. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Utara
4. Kolam Renang GOR Sunter
5. Kolam Renang Rawa Badak

Jakarta Selatan

6. Fasilitas Kolam Renang Bulungan
7. Gedung Kolam Renang PPOP Ragunan
8. Kolam Renang GMSB

Jakarta Barat

9. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Jakarta Timur

10. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Timur
11. Gedung kolam renang GOR Ciracas

- Lapangan Olahraga milik Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 35 unit + 52 Stadion/Lapangan Sepak Bola = 87 unit

Lapangan Olahraga : 35

Jakarta Pusat

1. Lap. Fitnes Terbuka

Jakarta Utara

2. Lap. Tenis Rawa Badak
3. Lap. Fitnes Terbuka

Jakarta Barat

4. Lapangan Basket terbuka Angsana Raya Cengkareng Timur
5. Lapangan Tenis / Futsal
6. Lapangan Tenis Cengkareng
7. Lapangan Tenis Jati Pulo RW 03, Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah
8. Lapangan Voli Kampung Belakang Kamal
9. Lapangan Voli Kapuk

Jakarta Selatan

10. Lapangan Basket Luar
11. Lapangan Tenis
12. Fasilitas Lapangan Tenis Bulungan (Semi Indoor)
13. Lapangan Tenis PPOP Ragunan
14. Lap. Fitnes Terbuka
15. Lapangan Luar (HOKI)
16. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
17. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
18. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
19. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
20. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)
21. Lapangan Serbaguna (Lap Hockey)

Jakarta Timur

22. Lap Basket Outdoor Tri On Tri GOR CIRACAS
23. Lap. Tenis Pondok Bambu
24. Lapangan Tenis Terbuka
25. Lap. Fitnes Terbuka
26. Lap. Fitnes Terbuka

Kepulauan Seribu

27. Lapangan Tenis Pulau Pramuka
28. Lapangan Voli Pulau Untung Jawa
29. Lapangan Voli Pulau Panggang
30. Lapangan Voli Pulau Karya
31. Lapangan Voli Pantai Pulau Untung Jawa
32. Lapangan Voli Pantai Pulau Karya
33. Lapangan Voli Pulau Pramuka
34. Lapangan Voli Pulau Panggang
35. Lapangan Bulutangkis Pulau Untung Jawa

Lapangan Sepak Bola : 38

Jakarta Pusat

1. Lapangan Sepakbola Karet Tengsin
2. Lapangan Sepakbola Pejompongan
3. Lapangan Sepakbola PORS Serdang

Jakarta Utara

4. Lapangan Sepakbola Kalibaru
5. Lapangan Sepakbola Muara Angke
6. Lapangan Sepakbola Rorotan

Jakarta Barat

7. Lapangan Sepakbola Pegadungan
8. Lapangan Sepakbola Semanan
9. Lapangan Sepakbola Srengseng
10. Lapangan Joglo
11. Lapangan Sepakbola Kedoya
12. Lapangan sepakbola Kebon Jeruk

13. Lapangan Sepakbola Persima
14. Lapangan Sepakbola Wijaya Kusuma
15. Lapangan Sepakbola Terbuka

Jakarta Selatan

16. Lapangan Sepak Bola Blok.S
17. Lapangan Sepakbola A. Yani
18. Lapangan Sepak Bola Kebagusan
19. Lapangan Sepak Bola Jagakarsa
20. Lapangan Sepak Bola Sukatani
21. Lapangan Sepak Bola Pesanggrahan
22. Lapangan Bola II
23. Lapangan Bola III

Jakarta Timur

24. Lapangan sepak bola setu
25. Lapangan Sepak bola Klender
26. Lapangan sepak bola cakung
27. Lapangan sepak bola kramat jati
28. Lapangan sepak bola gedong
29. Lapangan sepak bola cijantung
30. Lapang sepak bola kelapa dua wetan
31. Lapangan sepak bola cibubur
32. Lapangan sepak bola lubang buaya
33. Lapangan sepak bola ceger

Kepulauan Seribu

34. Lapangan Sepakbola Pulau Untung
35. Lapangan Sepakbola Pulau Karya
36. Lapangan Sepakbola Pulau Pramuka
37. Lapangan Sepakbola Pulau Tidung
38. Lapangan Sepakbola Pulau Kelapa

Stadion Sepakbola : 13

Jakarta Pusat

1. Stadion Sepakbola VIJ
2. Stadion Sepakbola Banteng

Jakarta Utara

3. Stadion Sepakbola GOR Sunter
4. Stadion Sepakbola Rawa Badak
5. Stadion Sepakbola Tugu
6. Stadion Kamal Muara

Jakarta Barat

7. Stadion Sepakbola Cendrawasih
8. Stadion Sepakbola Tamansari

Jakarta Selatan

9. Stadion Sepakbola GMSB
10. Stadion Sepakbola GOR Ragunan

Jakarta Timur

11. Stadion Bola Pondok Bambu
12. Stadion Sepakbola Gongseng
13. Stadion Sepakbola Ciracas

Stadion Atletik : 1

Jakarta Timur

1. Stadion Atletik GOR Rawamangun

Ex Penyelenggaraan Asian Games 2018

Jakarta Timur

1. Jakarta International Velodrome
2. Jakarta International Baseball Arena
3. Jakarta International Equestrian Park Pulomas
4. Jakarta International BMX Track

Selain itu terdapat banyak prasarana olahraga lain, baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak Swasta maupun Nasional, namun rasio antara jumlah penduduk dengan sarana olahraga masih kurang.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Proses perencanaan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan mengacu kepada program nasional khususnya yang berkaitan dengan even-even olahraga dan pemuda ditingkat nasional, pemasyarakatan dan pemasalah olahraga. serta even-even olahraga internasional yang dapat diikuti atau dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.61

Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017		RENJA SKPD : RKPD	
2	RENJA SKPD 2017	4	RKA : RENJA SKPD	100

3	RKA 2017	4	DPA : RKA	100
4	RKPD 2017	4		

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2018

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan dan kendala pada kegiatan Pengiriman Pemuda Pelopor Provinsi ke Tingkat Nasional adalah dalam mencari pemuda pelopor yang menonjol di bidang-bidang yang diperlombakan karena di DKI Jakarta jarang peminatnya sehingga sangat sulit dalam pencariannya di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota, jika di provinsi/daerah lain bidang-bidang yang diperlombakan masih banyak peminatnya.
2) Permasalahan dan kendala dalam kegiatan Lomba TUB dan Kreasi PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Panca Lomba PMR dan Ajang Kreativitas Pemuda adalah keikutsertaan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu karena Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta secara struktur tidak memiliki jalur organisasi langsung harus berkoordinasi dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sehingga tidak menganggarkan dalam kegiatan ini.
3) Permasalahan dari kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional adalah peserta kegiatan PPAN merupakan peserta yang telah lolos di tingkat wilayah kota / kabupaten. Sedikitnya jumlah peserta yang telah lolos seleksi di tingkat Kota / Kabupaten karena jumlah peserta seleksi di tingkat kota kurang dari target. Peserta yang akan lolos di tingkat provinsi harus mengikuti program selama 3 bulan karena program yg diadakan mengharuskan peserta yang terpilih untuk mengikutinya intens selama 1-3 bulan. Solusinya adalah sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga 5 Kotamadya DKI Jakarta agar peserta yang terjaring lebih banyak.
4) Permasalahan dari kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional adalah peserta kegiatan KPN merupakan peserta yang telah lolos di tingkat wilayah kota / kabupaten. Sedikitnya jumlah peserta yang telah lolos seleksi di tingkat Kota /

Kabupaten karena jumlah peserta seleksi di tingkat kota kurang dari target. Peserta yang akan lolos di tingkat provinsi harus mengikuti program selama 1-3 bulan karena program yg diadakan mengharuskan peserta yang terpilih untuk mengikutinya intens selama 1-3 bulan. Solusinya adalah sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga 5 Kotamadya DKI Jakarta agar peserta yang terjaring lebih banyak.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Pemuda dan Olahraga yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.62
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.		Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keolahragaan
2.		Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan
3.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
4.		Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja
5.		Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
6.		Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Layanan Gratis Penggunaan Kolam Renang Bagi Pelajar Pemegang Kartu Jakarta Pintar dan Fasilitas Pemuda dan Olahraga Bagi

		Sekolah Pada Hari dan Waktu Tertentu
7.		Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawail Negeri Sipil Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Analisa Jabatan
8.		Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda

Sumber : Disorda Prov. DKI Jakarta 2018

- **Program Kepemudaan**

  a) Pengiriman 2 orang Paskibraka Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka Nasional, dan selanjutnya terpilih 2 orang Paskibraka untuk ditugaskan ke tingkat Nasional sebagai Tim Paskibraka pengibaran bendera hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2018 atas nama Joddi Mursin Putra Elman (bertugas sebagai anggota Pasukan 17) dan Jessenia Sarah Aurelia (bertugas sebagai anggota Pasukan 17).

  b) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta *Youth Choir* pada Kompetisi International Festival Chorus Inside Advent di Roma, Italia dengan meraih juara dalam kategori Folklore, Sacred, dan Mixed, Golden Diploma Kategori Musik dan Koreografi, serta Special Award untuk Koreografi Terbaik dan Konduktor Terbaik, atas nama Septo Adi Kristanto Simanjuntak.

  c) Pengiriman Pemuda Pelopor dari Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional Tahun 2018 dan terpilih 2 orang peserta sebagai juara tingkat nasional atas nama Ryan Fiesta (Bidang Inovasi Teknologi) dan Pemuda Hebat atas nama Anggraini Kharisma (Bidang Agama, Sosial dan Budaya).

  d) Pengiriman kontingen Jambore Pemuda Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional Tahun 2018 dan terpilih sebagai Stand Kreativitas Pemuda Terbaik.

- **Program Olahraga Prestasi**

  a) Pengiriman Kontingen POPWIL DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) II Tahun 2018 di Solo, Jawa

Tengah. Kontingen Provinsi DKI Jakarta yang dikirim sebanyak 129 atlet, pelatih/asisten 22 orang, SC 9 orang, Paramedis 8 orang, manajer 11 orang, official 46 orang,Kontingen DKI Jakarta berhasil meraih 12 medali emas, 15 medali perak dan 6 medali perunggu, serta meloloskan seluruh cabang olahraga pada POPNAS 2019 di Papua

b) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta diikuti oleh 5 Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan melombakan 10 cabang olahraga Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Karate, Pencak Silat, Renang, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo dan Tenis Meja tingkat SD, SMP dan SMA dengan jumlah peserta sebanyak 18.930 pelajar terdiri dari 5 Provinsi, 8 cabang olahraga yang dilombakan, sebanyak 871 medali yang dilombakan, Kontingen Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi Juara umum pada kegiatan dimaksud
c) Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta terlaksana dengan peserta sebanyak 100 orang terdiri dari pelatih PPOP, pelatih SC pelatih pembina olahraga UNJ dan BAPOPSI, materi kegiatan disajikan oleh Narasumber sebanyak 5 orang dari FIK UNJ
d) Terlaksananya Kejuraan Renang Jakarta Terbuka dengan peserta sebanyak 400 orang terdiri dari sekolah-sekolah dan klub se-DKI Jakarta, sebanyak 34 medali yang diperebutkan
e) Terlaksananya Kejuraan Angkat Besi Jakarta Terbuka dengan peserta sebanyak 200 orang, 15 kelas putra/putri yang dilombakan, Atlet PPOP DKI Jakarta mendapatkan 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu, provinsi Lampung menjadi juara umum pada kegiatan dimaksud.
f) Terlaksananya Kejuraan Panahan Jakarta Terbuka peserta sebanyak 200 orang terdiri dari atlet pelajar DKI Jakarta dan atlet pelajar seluruh indonesia, medali yang dilombakan sebanyak 26 medali
g) Terlaksananya Kejuraan Perahu Naga Jakarta Open dengan peserta sebanyak 300 orang terdiri dari SMP, SMA dan SMK se Provinsi DKI Jakarta dan Klub & Komunitas Dayung Se-DKI Jakarta, 4 kelas yang dipertandingkan, Kelas SMP dimenangkan oleh SMPN 266 Jakarta Utara, Kelas SMAN & SMK dimenangkan

oleh SMAN 15 Jakarta Utara, Kelas Komunitas women dimenangkan oleh tim JPC Dragon, kelas Komunitas Open dimenangkan oleh tim JPC A (Men).

h) Terlaksananya Kegiatan Pengadaan pada Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Uji Coba Latihan dan Kejuaraan Nasional Tahun 2018 sehingga tersedianya perlengkapan atlet-atlet Pelajar DKI Jakarta yang bertujuan untuk mendukung pencapaian prestasi dalam melaksanakan Uji Coba Tanding seperti mengikuti Kejuaraan Nasional/Try Out Dalam dan Luar Negeri Nasional/Try Out Dalam dan Luar Negeri.

i) Prestasi olahraga yang diraih DKI Jakarta pada *single event* dan *multi event* antara lain.
   - Keikutsertaan pada Kejuaraan Bulutangkis Asia Junior Sport Exchange di Tokyo Jepang dengan perolehan medali 1 medali emas.
   - Keikutsertaan pada 6th Beijing Cup Football Tournament U-14 Tahun 2018 mendapatkan juara pertama, Pemain Terbaik, Top Scorer , dan Pelatih Terbaik
   - Keikutsertaan pada Tokyo Internasional Youth Football U-14 Tournament 2018 dan meraih peringkat ke-11 dari 20 tim.
   - Keikutsertaan Tim Cricket Putra pada Kejuaraan Annual Philipines International Cricket Sixes tahun 2018 dan meraih Juara Pertama.
   - Keikutsertaan Kontingen POPWIL DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL) II Tahun 2018 di Solo, Jawa Tengah dan meraih Peringkat ke-2 dengan 12 medali emas, 15 medali perak dan 6 medali perunggu.
   - Keikutsertaan Tim Judo Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Kutai Kartanegara, Kaltim dan meraih Juara Umum dengan 9 medali emas dan 3 medali perak.
   - Keikutsertaan Tim Atletik Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Gorontalo dan meraih Juara Umum dengan 6 medali emas, 4 medali perak dan 1 medali perunggu.
   - Keikutsertaan Tim Senam Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun

2018 di Riau dan meraih Juara Umum dengan 8 medali emas, 6 medali perak dan 1 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Dayung Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Sulawesi Tenggara dan meraih Juara Umum dengan 3 medali emas, 3 medali perak dan 2 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Renang Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Musi Banyuasin dan meraih Juara Umum dengan 8 medali emas, 8 medali perak dan 7 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Bola Voli Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Musi Banyuasin dan meraih 1 medali emas.
- Keikutsertaan Tim Taekwondo Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional 12th UPI Challenge Tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat dan meraih Juara Umum dengan 8 medali emas, 1 medali perak dan 2 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Bola Basket Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional PSMTI Cup antar SMA se-Indonesia di Pekanbaru, Riau dan meraih Juara Umum dengan 1 medali emas dan 1 medali perak.
- Keikutsertaan Tim Angkat Besi Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat dan meraih 2 medali emas, 3 medali perak dan 8 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Atletik Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Atletik Junior Jawa Timur Terbuka Tahun 2018 di Surabaya, Jawa Timur dan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak.
- Keikutsertaan Tim Taekwondo Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Mataram, NTB dan meraih 1 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Atletik Pelajar DKI Jakarta pada Thailand Sports School Games Tahun 2018 di Nakhon Si Thammarat dan meraih 1 medali emas dan 2 medali perunggu.

- Keikutsertaan Tim Bola Voli Pasir Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Bola Voli Pasir National Beach Series 2018 di Singapura dan meraih 1 medali perak.
- Keikutsertaan Tim Gulat Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Medan, Sumatera Utara dan meraih 1 medali perak dan 5 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Bola Voli Pelajar DKI Jakarta pada Thailand Sports School Games Tahun 2018 di Nakhon Si Thammarat dan meraih 1 medali perak.
- Keikutsertaan Tim Dayung Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Junior Canoeing dan Rowing Tahun 2018 di Palembang, Sumatera Selatan dan meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Tenis Meja Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Musi Banyuasin dan meraih 1 medali perak dan 1 perunggu.
- Keikutsertaan Tim Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP PPLD SKO Tahun 2018 di Padang, Sumatera Barat dan meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Atletik Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Atletik Panglima Open Tahun 2018 di Surabaya, Jawa Timur dan meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu.
- Keikutsertaan Tim Bulutangkis Pelajar DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional Daihatsu Astec Open Tahun 2018 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan meraih 2 medali perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Atletik pada Jateng Open 2018 - Semarang dan meraih 1 Medali Emas, 3 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Judo pada Kartika Cup – Palembang dan meraih 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Judo pada Jagsport Championship – Singapura dan meraih 4 Medali Emas, 3 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Karate pada Milo Karate Championship - KL, Malaysia dan meraih 2 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.

- Keikutsertaan Cabang Olahraga Kempo pada Kejurnas Kempo Mangupura - Bali dan meraih 1 Medali Emas dan 1 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Panahan pada Kartini Open Championship – Tegal dan meraih 4 Medali Emas, 3 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Pencak Silat pada Fact Fast" 9th International Silat KPT-UTHM Championship 2018 - Johor, Malaysia dan meraih 1 Medali Emas, 3 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Pencak Silat pada Kejurnas Mahasiswa Perti – Solo dan meraih 2 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Petanque pada Kejurnas Petanque Mahasiswa – Aceh dan meraih 2 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 3 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Renang pada Kejurnas Piala Walikota Surabaya – Surabaya dan meraih 1 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Renang pada Invitasi Renang Ganesa - Bandung dan meraih 6 Medali Emas, 13 Medali Perak dan 9 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Sepak Takraw pada Kejurnas UNIPA Cup – Surabaya dan meraih 1 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu.
- Keikutsertaan Cabang Olahraga Taekwondo pada 8th Tirak Taekwondo International Championship 2018 – Thailand dan meraih 2 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 5 Medali Perunggu

- **Program Pengembangan Olahraga**
  1. Pelaksanaan Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta
     a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.000 peserta mewakili atlet pelajar 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
     b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 656.436.000,- dengan realilasi Rp. 579.954.000,- (88,34%);

c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan olahraga atletik di kalangan pelajar Provinsi DKI Jakarta dan usia balita;
d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan bibit atlet atletik pelajar DKI Jakarta.
e. Kendala yang dihadapi adalah Belanja Hadiah Lomba/penghargaan/souvenir disesuaikan dengan efisiensi, Belanja makanan & Minum peserta disesuaikan dengan efisiensi, Belanja tenaga ahli kesehatan di ambil hanya sekali. Dan hanya ada 2 gelanggang olahraga yang memiliki Track Atletik yang standar kejuaraan nasional;
f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

2. Pelaksanaan Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta
   a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.800 peserta mewakili atlet pelajar 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
   b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 591.199.500,- dengan realilasi Rp. 527.641.500,- (89.24%);
   c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan olahraga renang di kalangan pelajar Provinsi DKI Jakarta;
   d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan bibit atlet renang pelajar DKI Jakarta.
   e. Kendala yang dihadapi adalah Belanja Hadiah Lomba/penghargaan/souvenir disesuaikan dengan efisiensi, Belanja makanan & Minum peserta disesuaikan dengan efisiensi, Belanja tenaga ahli kesehatan di ambil hanya sekali dan faktor cuaca terkadang menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan;
   f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar

dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

3. Pelaksanaan Kejuaraan Sepatu Roda Pelajar Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Sepatu Roda Pelajar Provinsi DKI Jakarta sebanyak 300 peserta mewakili atlet pelajar 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 329.308.500,- dengan realilasi Rp. 316.635.300,- (96,15%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan olahraga sepatu roda di kalangan pelajar;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan bibit atlet sepatu roda pelajar DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah Pajak pada Belanja makanan & Minum peserta tidak dapat terserap, belum tersedianya Gelanggang Olahraga yang memiliki track lomba sepatu roda
    f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.
4. Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta sebanyak 550 peserta mewakili atlet pelajar 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 270.339.000,- dengan realilasi Rp. 240.727.500,- (89,04%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan bibit atlet beladiri pelajar DKI Jakarta
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan bibit atlet beladiri pelajar DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah Belanja Hadiah Lomba/penghargaan/souvenir disesuaikan dengan efisiensi, Belanja makanan & Minum peserta

disesuaikan dengan efisiensi, Belanja tenaga ahli kesehatan tidak terlaksana;

f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

5. Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta
   a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta sebanyak 850 peserta mewakili atlet pelajar pondok pesantren 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
   b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 457.923.450,- dengan realilasi Rp. 356.914.000,- (77,94%);
   c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan pertandingan Olahraga di kalangan santri Pondok Pesantren;
   d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Terciptanya santri atlet olahraga Pondok Pesantren di Provinsi DKI Jakarta;
   e. Kendala yang dihadapi adalah Belanja Hadiah Lomba/penghargaan/souvenir disesuaikan dengan efisiensi, Belanja makanan & Minum peserta disesuaikan dengan efisiensi, Belanja Barang olahraga pakai habis (bola basket) tidak terlaksana, Belanja tenaga ahli kesehatan tidak terlaksana.
   f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.
6. Pelaksanaan Pekan Paralimpik tingkat Provinsi DKI Jakarta
   a. Realisasi volume peserta pada Pekan Paralimpik tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 400 peserta mewakili atlet disabilitas 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;

b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 395.444.540,- dengan realilasi Rp. 374.519.500,- (94,70%);
c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan olahraga di kalangan penyandang disabilitas;
d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan calon atlet disabilitas untuk pengiriman tingkat nasional mewakili Provinsi DKI Jakarta;
e. Kendala yang dihadapi adalah
    - Adanya Efisiensi Harga hasil negosiasi penawaran dari pilihan spesifikasi medali dan piala yang sesuai. Adapun khususnya volume untuk komponen medali dalam kegiatan multi event ini cukup banyak dimana menyediakan total 66 nomor lomba untuk 5 cabang olahraga yang dipertandingkan.
    - Adanya Efisiensi dari Harga hasil negosiasi penawaran. Adapun khususnya volume untuk komponen makan yang diperuntukkan bagi peserta, pendamping peserta, wasit/juri dan petugas lapangan dalam kegiatan multi event ini cukup banyak dimana menyediakan 576 box/hari selama 3 hari.
    - Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

7. Pelaksanaan Kejuaraan Bocce dan Sepakbola bagi Tuna Grahita Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Bocce dan Sepakbola bagi Tuna Grahita Provinsi DKI Jakarta sebanyak 500 peserta mewakili atlet disabilitas 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 334.585.650,- dengan realilasi Rp. 299.770.540,- (89,59%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan olahraga di kalangan penyandang disabilitas;

d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan calon atlet disabilitas untuk pengiriman tingkat nasional mewakili Provinsi DKI Jakarta;
e. Kendala yang dihadapi adalah
    - Adanya Efisiensi Harga hasil negosiasi penawaran dari pilihan spesifikasi medali dan piala yang sesuai. Adapun khususnya volume untuk komponen medali dalam kegiatan Kejuaraan Bocce Tuna Grahita cukup banyak dimana menyediakan total 70 nomor lomba dengan berbagai kategori dan divisi.
    - Adanya Efisiensi Harga hasil negosiasi penawaran dari pilihan spesifikasi medali dan piala yang sesuai. Adapun khususnya volume untuk komponen medali dalam kegiatan Kejuaraan Sepakbola Tuna Grahita cukup banyak dimana menyediakan total 45 set medali dikarenakan 1 tim terdiri dari 1 manajer, 1 pelatih, 12 pemain, dan 1 ofisial diberikan semua kepada juara 1 s.d. juara harapan 2 untuk setiap divisi. Total ada 3 divisi.
    - Adanya Efisiensi Harga dari hasil negosiasi penawaran dengan volume 129 buah kaos kerah untuk wasit/juri, petugas lapangan, dan pembina/pendamping serta 300 buah kaos oblong untuk 150 peserta digunakan selama 2 hari kejuaraan.
    - Adanya Efisiensi Harga dari hasil negosiasi penawaran dengan volume kostum (baju/celana) sebanyak 180 stel
    - Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

8. Pelaksanaan Kejuaraan Renang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Renang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sebanyak 300 peserta

mewakili atlet disabilitas 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;

b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 164.988.150,- dengan realilasi Rp. 156.707.350,- (94,98%);
c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memasalkan olahraga di kalangan penyandang disabilitas;
d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan calon atlet renang disabilitas untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta;
e. Kendala yang dihadapi adalah 1. Adanya Efisiensi Harga pada belanja barang pakai habis sandang berupa kaus kegiatan, efisiensi harga pada belanja makan minum peserta, dan efisiensi harga pada belanja hadiah lomba berupa medali.
f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

9. Pengiriman kontingen disabilitas pada kejuaraan tingkat nasional
   a. Realisasi volume peserta pada kontingen disabilitas pada kejuaraan tingkat nasional pada event PORNAS Soina 2018 Riau sebanyak 144 orang mewakili Provinsi DKI Jakarta;
   b. Anggaran biaya kegiatan Rp. 591.834.000,- dengan realisasi Rp. 588.777.100,- (99,48%);
   c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memberi kesempatan kepada atlet penyandang disabilitas untuk bersaing di tingkat nasional mewakili Provinsi DKI Jakarta;
   d. Hasil (outcome) kegiatan pada event PORNAS Soina 2018 Riau, Kontingen Provinsi DKI Jakarta mampu meraih 17 emas, 10 perak, dan 14 perunggu;
   e. Kendala yang dihadapi adalah Adanya Efisiensi dari Harga hasil negosiasi penawaran untuk volume sebanyak 336 buah bagi total kontingen yang berjumlah 112 orang dimana setiap orang mendapatkan @3 buah selama pelaksanaan event,

serta 170 kaos oblong untuk atlet, pelatih dan aspel digunakan pada saat Training Center selama 3 bulan;

f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

10. Pelaksanaan Festival Pencak Silat Betawi
    a. Realisasi volume peserta pada Festival Pencak Silat Betawi sebanyak 725 peserta mewakili para anggota perguruan silat betawi di Provinsi DKI Jakarta;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 410.140.000,- dengan realilasi Rp. 310.540.000,- (95,73%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Terlaksananya Festival Pencak Silat Betawi;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Terjalin tali silaturahmi antar perguruan pencak silat betawi di DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah anggaran yang tersisa dikarenakan effisiensi dari komponen belanja makanan dan minuman peserta, petugas, dan panitia dan tidak semua perkumpulan silat betawi yang terakomodir untuk dapat tampil di acara Festival Pencak Silat Betawi;
    f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.
11. Pengiriman kontingen disabilitas pada kejuaraan tingkat internasional
    a. Realisasi volume peserta pada kontingen disabilitas pada kejuaraan tingkat internasional sebanyak 40 orang mewakili Provinsi DKI Jakarta;
    b. Anggaran biaya kegiatan Rp. 93.478.550,- dengan realisasi Rp. 89.490.500,- (95,73%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memberi kesempatan kepada atlet penyandang disabilitas untuk bersaing di tingkat internasional mewakili Provinsi DKI Jakarta;

d. Hasil (outcome) kegiatan
   - Kejuaraan 5th Asia Pacific Deaf Badminton Championship Kuala Lumpur Malaysia 2018 Kontingen Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Indonesia mampu meraih 2 emas dan 2 perak dan 1 perunggu.
   - Kejuaraan Para Table Tennis Copa Tango 2018, Kontingen Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Indonesia mampu meraih 5 emas dan 3 perak dan 2 perunggu.
   - Kejuaraan Para Table Tennis Spanish Open 2018, Kontingen Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Indonesia mampu meraih 5 emas dan 2 perak dan 2 perunggu.
   - 5th APTBF Bowling Championship Tahun 2018 di Manila-Philipina 2018 - Kontingen Bowling Disabilitas Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih total medali 1 emas dan 5 perunggu.

f. Kendala yang dihadapi adalah 1. Adanya Efisiensi dari Harga hasil negosiasi penawaran perlengkapan kontingen (Training packs) yang digunakan Tim Tenis Meja Disabilitas Tuna Dhaksa untuk mengikuti ITTF Para Table Tennis 'Spanish Open 2018'. Sedangkan peralatan Kostum Tanding, Sepatu Kets dan Kaos Kaki diperuntukkan untuk Tim Sepakbola Disabilitas Tuna Grahita dalam mengikuti Turnamen Gothia Cup di Gothenburg-Swedia. 2. Adanya Efisiensi dari Harga hasil negosiasi penawaran untuk volume sebanyak 505 buah bagi Kontingen Disabilitas dalam mengikuti berbagai event (ITTF, Gothia Cup, dan 1st ASEAN Deaf Games);

g. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

12. Pelaksanaan POR Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada POR Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta sebanyak 650 peserta

mewakili Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dari masing – masing SKPD;

b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 296.110.000,- dengan realilasi Rp. 284.670.650,- (96,13%);
c. Keluaran (output) kegiatan adalah Terlaksananya POR Organisasi Wanita DKI Jakarta;
d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Terjalin tali silaturahmi antar anggota organisasi wanita di DKI Jakarta;
e. Kendala yang dihadapi adalah anggaran yang tersisa dikarenakan effisiensi dari komponen belanja makanan dan minuman peserta, petugas, dan panitia. Kebutuhan lokasi yang representatif sesuai arahan dharma wanita.
f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

13. Penghargaan Bagi Pelatih dan Atlet Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2018
    a. Realisasi volume peserta pada Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2018 sebanyak 139 peserta berprestasi di tingkat nasional dan internasional;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 2.564.000.000,- dengan realilasi Rp. 1.977.000.000,- (77,10%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Memberikan motivasi dan apresiasi penghargaan atas prestasi yang diraih oleh atlet dan pelatih berkebutuhan khusus di event tingkat nasional dan internasional pada Tahun 2018;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Kebanggaan dan loyalitas serta peningkatan motivasi dengan pemberian penghargaan untuk atlet dan pelatih berkebutuhan khusus Provinsi DKI Jakarta yang telah berprestasi tingkat nasional dan internasional pada tahun 2018;
    e. Kendala yang dihadapi adalah dikarenakan medali yang diraih atlet tidak dapat dipastikan dari awal dan

bersifat prediksi sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang telah disusun dalam DPA, adapun terdapat 1 Multi Event yang rencana akan diikuti Kontingen Disabilitas Tuna Rungu pada bulan Desember 2018, yaitu Multi Event 1st ASEAN Deaf Games yang merupakan kejuaraan olahraga terbesar se-Asia Tenggara khusus penyandang disabilitas tuna rungu tidak jadi dilaksanakan oleh panitia lokal di Bangkok dan diundur menjadi tahun 2019 sehingga prediksi raihan medali yang direncanakan akhirnya tidak dapat terserap.

f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin.

14. Persiapan dan Pelaksanaan Asian Paragames 2018 di Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Persiapan dan Pelaksanaan Asian Paragames 2018 di Jakarta sebanyak 300 peserta;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 2.151.655.715,- dengan realilasi Rp. 761.650.300,- (35,39%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Asian Paragames 2018 di Jakarta;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan Asian Paragames 2018 di Jakarta berlangsung sukses dan aman, dan meningkatnya kerjasama antara panitia pelaksana dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah
        - Pengadaan Kaos Oblong yang direncanakan akan dilelang, namun setelah mendapat kajian dari Tim PPBJ Pokja Balaikota terkait timeline yang dibuat diperkiraan akan melebihi waktu pelaksanaan Asian Para Games sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penunjukkan langsung dengan menyerap anggaran dibawah 200 juta.
        - Komponen makan dan minum tidak jadi diserap karena sudah diakomodir oleh panitia pusat INAPGOC, sehingga menghindari duplikasi.

- Sisa anggaran dari komponen pengadaan Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi adalah hasil efisiensi negosiasi penawaran harga

f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

15. Pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3000 peserta mewakili karyawan – karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari SKPD dan UKPD;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 275.790.000,- dengan realilasi Rp. 254.520.000,- (92,28%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah terlaksananya kegiatan untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani Karyawan masyarakat Provinsi DKI Jakarta;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Terukurnya tingkat kesegaran jasmani Karyawan masyarakat Provinsi DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah anggaran yang tersisa dikarenakan effisiensi dari komponen belanja makanan dan minuman peserta, petugas, dan panitia, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tidak sesuai dengan yang telah di targetkan
    f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.
16. Penyediaan Instruktur dan Pelatih Olahraga tingkat Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Senam Kebugaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta sebanyak 47 instruktur senam di 3 tempat pelaksanaan;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 741.950.000,- dengan realilasi Rp. 721.219.500,- (97,20%);

c. Keluaran (output) kegiatan adalah terlaksananya kegiatan memasalkan olahraga senam di lingkungan Pegawai Pemda DKI Jakarta;
d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mengolahragakan masyarakat dengan senam kesegaran jasmani yang rutin dan terpandu dengan baik oleh instruktur senam yang berpengalaman dan tersertifikasi.
e. Kendala yang dihadapi adalah bertambahnya ajuan permintaan instruktur senam tidak dapat dipenuhi semuanya
f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

17. Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta
    a. Realisasi volume peserta pada Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta sebanyak 900 peserta mewakili atlet pelajar 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 503.525.000,- dengan realilasi Rp. 440.540.000,- (87,49%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah Mendapatkan bibit atlet olahraga tradisional usia pelajar di Provinsi DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah anggaran yang tersisa dikarenakan effisiensi dari komponen belanja makanan dan minuman peserta, petugas, dan panitia; Tidak adanya kode belanja untuk penganggaran sewa maupun belanja barang pakai habis untuk keperluan peralatan perlombaan olahraga tradisional
    f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan.

18. Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
    a. Realisasi volume peserta pada Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebanyak 1 paket pelaksanaan kegiatan;
    b. Anggaran Biaya kegiatan Rp. 320.505.014,- dengan realilasi Rp. 296.200.500,- (92,41%);
    c. Keluaran (output) kegiatan adalah Terlaksananya Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;
    d. Hasil (outcome) kegiatan adalah meningkatnya interaksi antar warga dan mendapatkan bibit atlet olahraga usia pelajar di Provinsi DKI Jakarta;
    e. Kendala yang dihadapi adalah anggaran yang tersisa dikarenakan effisiensi dari komponen belanja makanan dan minuman peserta, petugas, dan panitia; Pengganggaran Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun masuk di tahap APBD-P 2018 dan merupakan event baru.
    f. Solusi yang dilakukan adalah efissiensi anggaran semaksimal mungkin. Dan diusulkannya komponen harga satuan yang bervariasi dalam E-Budgeting agar dapat membuat rencana kerja kegiatan dengan pilihan harga yang sesuai kebutuhan

- **Program Prasarana Olahraga dan Pemuda**

1) Terbangunnya Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cilandak yang memiliki fasilitas antara lain Ruang Auditorium, Area Multi Olahraga, Ruang Multifungsi dan fasilitas untuk Disabilitas (ruangan, ramp, toilet, tempat duduk, guidance block)
2) Terbangunnya Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pademangan yang memiliki fasilitas antara lain Ruang Auditorium, Area Multi Olahraga, Ruang Multifungsi dan fasilitas untuk Disabilitas (ruangan, ramp, toilet, tempat duduk, guidance block)
3) Terbangunnya Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman yang memiliki fasilitas antara lain Ruang Auditorium, Area Multi Olahraga, Ruang Multifungsi dan fasilitas untuk Disabilitas (ruangan, ramp,

toilet, tempat duduk, guidance block)

4) Terbangunnya Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran yang memiliki fasilitas antara lain Ruang Auditorium, Area Multi Olahraga, Ruang Multifungsi dan fasilitas untuk Disabilitas (ruangan, ramp, toilet, tempat duduk, guidance block)
5) Terbangunannya Fasilitas olahraga GOR Pondok Bambu terdiri Lapangan Futsal, Basket, Tenis, Outdoor Fitnes, dan Area Bermain serta Terehabilitasinya Gedung Olahraga Volly Indoor
6) Terbangunnya Lampu Stadion Sepakbola di GOR Sunter
7) Terehabilitasi Gedung Serbaguna Raden Inten

7. Penanaman Modal

a. Prioritas urusan

Prioritas urusan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- Program Peningkatan Penanaman Modal
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal

b. Program dan kegiatan

Program Provinsi untuk Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.63
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Penanaman Modal

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Program Peningkatan Penanaman Modal
2	Program Dukungan Manajemen dan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	Pintu
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal
Jml	**2**	**4**

Sumber : BPMP Prov. DKI Jakarta 2018

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 4 program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian program dan jumlah kegiatan sebagaimana tampak pada berikut

Tabel 3.64
Program Urusan Penanaman Modal

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Penanaman Modal	4	4	100
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	14	100
3.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	9	9	100
4.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	3	3	100
Jumlah		**30**	**30**	**100**

Sumber : DPMPTSP Prov. DKI Jakarta 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Urusan penanaman modal dilimpahkan ke DPMPTSP pada tahun 2017. Menurut Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencabutan peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 14 tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota, dan peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 10 tahun 2012 tentang petunjuk

teknis standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota meningkatkan pelayanan pada urusan Penanaman Modal, maka dari itu DPMPTSP tidak mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk itu disajikan tingkat pencapaian indikator kinerja utama selama 2 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.65
Indikator SPM Urusan Penanaman Modal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi 2015	Realisasi 2017
		Indikator	Nilai		
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	1 (satu) kali	
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:			
		Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali	
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.	1 (satu) kali/ tahun	0	Kegiatan promosi diganti dengan kegiatan penyusunan bahan promosi
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:			
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi 2015	Realisasi 2017
		Indikator	Nilai		
		Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100%		
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.	100%		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun	
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikann ya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%	100%	
7	Penyebarluas an, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2 kali	

Sumber : DPMPTSP Prov. DKI Jakarta 2018

Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

No	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	55 Triliun	108,6 Triliun	100%	93,1 Triliun	114,2 Triliun	100%
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	85,50	85,55	100%
3	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Sistem perizinan berbasis online (200 jenis izin online)	Sistem perizinan berbasis online (216 jenis izin online)	100%	100% (269 Izin online)	100% (269 Izin online)	100%

Sumber : DPMPTSP Prov. DKI Jakarta 2018

Hasil-hasil kegiatan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp 108,6 Triliun menjadi Rp 114,2 Triliun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 5,16%.

2. Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total pusat layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 307 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota, 42 layanan kecamatan dan 259 unit kelurahan. Survey

dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (Structured Quesionaire). Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 sebesar 85,55 dari target sebesar 85,50 atau tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 2,25% yakni dari 83,66 pada tahun 2017 menjadi 85,55 pada tahun 2018.

3. Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah calo yang merugikan pemohon. Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2018 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 maupun target jangka menengah maka indikator ini telah tercapai 100%.

Tabel 3.66
Volume Penanaman Modal

Tahun	PMA		PMDN		Jumlah proyek
	Proyek	Investasi (Juta US $)	Proyek	Investas (Milyar Rupiah)	
2011	1.094	4.824,00	84	9.257,00	1.178
2012	1.148	4.107,70	108	8.540,10	1.256
2013	3.028	2.591,10	156	5.754,50	3.184
2014	3.799	4.509,40	167	17.811,50	3.966
2015	4.463	3.619,00	316	15.513,00	4.779
2016	6.751	3.398,20	463	12.216,90	7.214
2017	6483	4.600,00	497	47.300.00	6.980

Sumber : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta 2017

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai sebanyak orang sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.67
Rekapitulasi Pegawai DPMPTSP

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**		
	1. Golongan IV	44	
	2. Golongan III	1076	
	3. Golongan II	159	
	4. Golongan I	3	
B.	**Eselon**		
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	2	
	2. Eselon III	54	
	3. Eselon IV	332	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	6	
	7. Pelaksana (Staf)	888	
C.	**Pendidikan**		
	1. S3	2	
	2. S2	70	
	3. S1	863	
	4. Diploma	138	
	5. SLTA	201	
	6. SLTP	7	
	7. SD	1	

Sumber : BKD Provinsi DKI Jakarta 2018

Dari 394 jabatan struktural yang ada pada urusan penanaman modal, akhir Desember 2018 telah terisi 388, jumlah jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Tabel 3.68
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Penanaman Modal

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	2	2	2	2	1
2	Eselon III	56	54	54	54	26
3	Eselon IV	336	332	332	332	31
Jumlah		394	388	388	388	58

Sumber : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 338 / 388 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 58 / 338 = 50 %
- Kepangkatan : 338 / 338 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Penanaman Modal tahun anggaran 2018 sebesar Rp.798.268.176.970,-. Anggaran yang terserap sebesar Rp.721.006.013.611,- (90,32%)

Tabel 3.69 Alokasi dan Realisasi Anggaran DPMPTSP

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN PENANAMAN MODAL	**798.268.176.970**	**721.006.013.611**	**90,32**
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	547.551.384.000	516.331.595.266	94,30
2. BELANJA LANGSUNG	250.716.792.970	204.674.418.345	81,62
a. BELANJA PEGAWAI	193.241.370.054	157.990.452.371	81.70
b. BELANJA BARANG DAN JASA	1.271.145.348	195.019.000	15,30
- Belanja Pemeliharaan	56.204.277.568	46.488.946.974	82,70
c. BELANJA MODAL			-
CATATAN PERBANDINGAN	798.268.176.970		
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	46.488.946.974	721.006.013.611	
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	195.019.000	157.990.452.371	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	195.019.000	721.006.013.611	
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	**798.268.176.970**	**721.006.013.611**	**90,32**

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pada tahun 2017 berkantor berkantor di Mal Pelayanan Publik Jalan HR Rasuna Said Kav C 22, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan. Sarana dan prasarana lainnya bersifat alat perkantoran pada umumnya termasuk untuk pengembangan teknologi informasi, memiliki sarana dan prasarana yang spesifik berupa alat ukur dan mobile service unit (MSU). Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.70
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Penanaman Modal

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Papan Pengumuman	Ada	
2.	Kotak Pengaduan	Ada	
3.	Leaflet	Ada	

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
4.	Media Masa	Ada	
5.	Website	Ada	
6.	Standing Poster	Ada	
7.	Banner	Ada	
8.	LCD	Ada	

Sumber : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta 2018

- Website : pelayanan.jakarta.go.id
- Call Center : 1500164

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Penanaman Modal sebagian besar merupakan top down karena melaksanakan kebijakan-kebikan Pusat maupun Daerah/ Penyusunan perencanaan dilakukan sesuai dengan hierarki perencanaan, yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP) dan daerah (RPJMD/RKPD) dan kebutuhan nyata di lapangan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) SKPD. Perencanaan Urusan Penanaman Modal sebagaian besar merupakan top down karena melaksanakan kebijakan-kebijakan pusat maupun daerah, khususnya yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Tabel 3.71
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Penanaman Modal

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	5	RENJA SKPD : RKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	5	RKA : RENJA SKPD	100
3	RKA 2018	5	DPA : RKA	100
4	DPA 2018	5		

Sumber : BPMP Prov. DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Kebijakan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang belum terintegrasi dengan sistem informasi pelayanan izin di daerah (JAKEVO).
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait ease of doing business (EODB).
- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

Tindak lanjut permasalahan :

- Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi teknis dengan Tim Teknis OSS di Kemenko Perekonomian agar sistem OSS dan JAKEVO dapat terintegrasi dengan baik.
- Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
- Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / Ease Of Doing Business (EODB) di Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

- Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka dikeluarkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2018, dengan dikeluarkan Instruksi tersebut maka melakukan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penyelenggaraan PTSP pada ruang publik seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, terminal, pasar tradisional, dan ruang publik lainnya. Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik ini adalah pengembangan dari PTSP Goes To Mall yang awalnya membuka pelayanannya di Mall wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Berdasarkan Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka pelaksanan sistem manajemen yang rapi, tertib dan terintegrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta implementasi sistem manajemen mutu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan standar operasional prosedur manajemen mutu, bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Manual Mutu dan dokumen Sistem Manajemen Mutu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Manual Mutu dan Dokumen Sistem Manajemen Mutu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

- Terhitung sejak hari Jumat, 21 Desember 2018, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan dibutuhkan pertumbuhan jumlah kegiatan usaha, untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kegiatan usaha perlu didukung oleh perizinan usaha yang cepat dan mudah dan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan memulai berusaha, perlu dibentuk gerai memulai usaha (Starting a Business Corner) pada Mal Pelayanan Publik, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pembuatan Gerai Memulai Usaha (Starting a Business Corner) pada Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Penanaman Modal yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.72
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Penanaman Modal

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta	1. Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Pergub Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Pergub Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber : BPMP Prov. DKI Jakarta, 2018

Penghargaan yang diraih dari K/L selama tahun 2018 :

1. Penghargaan dari Menteri PAN & RB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori " Sangat Baik" Tahun 2018
2. Realisasi Investasi tertinggi di Indonesia dari BKPM
3. Penghargaan sebagai nominasi Investment Award Penyelenggaraan PTSP Provinsi Terbaik Tahun 2018 dari BKPM
4. Penghargaan dari Kemenpan RB sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 untuk PTSP Goes To Mall : Sinergi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
5. Penghargaan dari Kemenpan RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima tahun 2018

8. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Prioritas Urusan

Terdapat 2 Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 di DKI Jakarta yaitu :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

b. Program dan Kegiatan

Program Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.73
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Koperasi dan UKM

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
1	Pelatihan atau Bimbingan Teknis bagi Para Wirausaha Pemula	Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
2	Fasilitasi Permodalan bagi Para Wirausaha Pemula	Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
3	Fasilitasi Pinjaman Dana Bergulir bagi Para Wirausaha Muda melalui LPDB KUMKM	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
4	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi Produk yang Dikelola oleh	Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI
	Pelaku Usaha bagi Para Wirausaha Pemula berbasis IT (technopreneur)	
5	Fasilitasi Hak Cipta dan Hak Merek serta IUMK bagi para Wirausah Pemula	Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
	5	**4**

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2017

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 4 program pada Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan untuk urusan Koperasi dan UKM. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.74
Rincian Program Urusan Koperasi dan UKM

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	4
2.	Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	57
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24
	Jumlah Total	96

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan hasil kegiatan pada Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Jumlah koperasi aktif sebanyak 2.411 (69,58%) dari 3.465 koperasi yang ada
- Pencapaian kegiatan

Tabel 3.75
Realisasi Program Urusan Koperasi dan UKM

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	4	4	100

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
2	Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	57	56	98.25
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11	11	100
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24	24	100
Jumlah Total		98	98	99.56

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2018

- Program Pembinaan dan Pengembangan Koperas
  - Akta Pendirian Koperasi
  - Audit Laporan Keuangan UPDB PEMK per 31 Desember 2015
  - Partisipasi HARKOPNAS EXPO 2018
  - Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- Program Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
  - Partisipasi Event Big Bang Jakarta 2018
  - Partisipasi Pameran UKM Luar Kota
  - Pemasaran Produk UKM pada Acara Lebaran Betawi
  - Pembangunan Tempat Kumpul Kreatif (TKK) dan Betawi Store
  - Pembinaan Kewirausahaan di Kepulauan Seribu
  - Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu
  - Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL
  - Pengawasan PKL.
  - Pengelolaan Jakarta Creative Hub (JCH)
  - Promosi Produk UKM pada ASIAN Games 2018
  - UKM Award
- Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Pemeliharaan KDO/KDO Khusus
- Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
- Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus

- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - Pemeliharaan Taman Dinas
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Gedung Promosi UKM
  - Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Gedung Promosi UKM
  - Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
  - Penyediaan Tenaga Lapangan Umum Petugas Mekanikal Elektrikal
  - Penyusunan Renstra Dinas KUKMP 2018 - 2022
- volume usaha koperasi dengan besar volume usaha Rp 973.357.230.516 di tahun 2018.
- Meningkatnya jumlah koperasi dari 5.771 koperasi di tahun 2017 menjadi 5.876 koperasi di tahun 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan dengan jumlah pegawai sebanyak 174 orang. Sebagian pegawai Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan juga melaksanakan Urusan Perdagangan.

Tabel 3.76
Rekapitulasi Pegawai Urusan Koperasi dan UKM

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**174**	
	1. Golongan IV	20	
	2. Golongan III	140	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	3. Golongan II	14	
	4. Golongan I	-	
B.	**Eselon**	**174**	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	10	
	4. Eselon IV	22	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	-	
	7. Pelaksana (Staf)	141	
C.	**Pendidikan**	**174**	
	1. S3	-	
	2. S2	23	
	3. S1	78	
	4. Diploma	13	
	5. SLTA	60	
	6. SLTP	0	
	7. SD	0	

Sumber : Dinas Koperasi UKM, serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta. 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.77
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Koperasi dan UKM

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	10	10	10	7	10
3	Eselon IV	22	22	22	16	22
Jumlah		33	33	33	24	33

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM. 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 33 / 33 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 24 / 36 = 72,73 %
- Kepangkatan : 33 / 33 = 100,00 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.78 Anggaran Urusan Koperasi dan UKM

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KOPERASI, USAHA MIKRO dan KECIL	195.813.738.567	160.762.281.334	82,10
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	148.367.809.403	125.879.923.306	84,84
2. BELANJA LANGSUNG	47.445.929.164	34.882.358.028	73,52
a. BELANJA PEGAWAI	2.478.737.965	2.229.241.340	89,93
b. BELANJA BARANG DAN JASA	44.780.904.922	32.473.271.288	72,52
Biaya Pemeliharaan	2.578.293.886	1.876.805.733	72,79
c. BELANJA MODAL	186.286.277	179.845.400	96,54
CATATAN :	-	-	-
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	195.813.738.567	200.240.785.043	97,79
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	186.286.277	195.813.738.567	0,10
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.578.293.886	44.780.904.922	5,76
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	2.578.293.886	195.813.738.567	1,32

Sumber : BPKAD Prov. DKI Jakarta 2018

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Koperasi dan UKM tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.79
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Koperasi dan UKM

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Dinas	JP	JU	JT	JS	JB	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	-	-	1	-	2	5
2.	Kotak Pengaduan	1	1	-	-	1	-	-	3
3.	Leaflet	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mobil Keliling	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		Dinas	JP	JU	JT	JS	JB	UPT	
5.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Website	1	-	-	-	-	-	-	1
7.	E-mail	1	-	-	-	-	-	-	1
8.	Call Center	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM. 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar merupakan *top down* karena melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah. Namun demikian terdapat juga usulan-usulan masyarakat yang perlu diakomodasi yang disampaikan melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan khususnya yang terkait dengan permodalan dan lokasi usaha.

Tabel 3.80
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Koperasi dan UKM

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	2	RENJA SKPD : RKPD	100%
2	RENJA SKPD 2018	2	RKA : RENJA SKPD	100%
3	RKA 2018	2	DPA : RKA	100%
4	DPA 2018	2		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM. 2018

h. Permasalahan dan solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL Lenggang Jakarta Islamic Center yang dianggarkan hanya dapat terealisasi hanya sampai proses perencanaan, kegiatan pelaksanaan terkendala karena waktu untuk proses lelang dan tidak mencukupi.
2) Sarana prasarana Pusat Diklat kurang memadai untuk melakukan Diklat dengan jumlah peserta diatas 50 orang.

3) Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui 2 tahap. Pencairan tahap 2 tergantung dari laporan realisasi penyerapan tahap 1, sehingga anggaran tidak bisa direalisasi.
4) Beberapa sarana prasarana penunjang kinerja pegawai rusak, namun terkendala dalam usulan anggaran terkait pengadaan

Solusi yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut adalah melalui :

1) Mempersiapkan perencanaan kegiatan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan pengganggaran yang berlaku dan pengaturan jadwal yang lebih efektif dan efisien.
2) Menggunakan beberapa angkatan untuk menampung jumlah peserta yang melebihi kapasitas ruangan.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.81
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Koperasi dan UKM

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	1. Pergub Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan. 2. Pergub Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung 3. Pergub Nomor 310 Tahun 2016 tentang Pembentukan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan.
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Pergub Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
3	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi	

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Prioritas urusan

- Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan
- Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
- Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
- Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan
- Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.82
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Penataan Administrasi	Program Penataan Administrasi

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan
Jml	**2**	**7**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, terdapat 1 Program Daerah dalam Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

Tabel 3.83
Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Jumlah
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	75
Total		**75**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

Capaian kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.84
Realisasi Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	75	74	98,67%
Jumlah		75	74	98,67%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Capaian SPM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Standar Pelayanan Minimal	Tahun			
		2017		2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	97,12%	100%	99,42%
2	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	97,96%	100%	98,42%
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	85%	99,97%	85%	73,30%
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	50%	99,99%	65%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta

Dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan daerah sebagai dasar operasional, yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akses Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilakukan melalui KPD yang menyelenggarakan urusan.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang perangkatnya sampai ke Kelurahan.

Tabel 3.85
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin								JML
		DIN	JP	JU	JT	JS	JB	PS	UPT	
A.	**Golongan**	**63**	**63**	**45**	**82**	**79**	**69**	**14**	**11**	
	• Golongan IV	14	4	4	9	8	3	1	1	
	• Golongan III	33	48	32	65	58	56	10	6	
	• Golongan II	15	11	9	8	13	10	3	4	
	• Golongan I	1	-	-	-	-	-	-	-	1
B.	**Eselon**	**63**	**64**	**51**	**70**	**80**	**90**	**15**	**22**	**461**
	• Eselon I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	• Eselon III	4	1	1	-	1	1	1	2	12
	• Eselon IV	16	12	10	12	13	12	5	2	82
	• Eselon V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Staf	47	51	40	58	66	77	9	18	366
C.	**Pendidikan**	**69**	**64**	**51**	**70**	**80**	**90**	**15**	**22**	**461**
	• S2	18	5	5	6	10	8	3	4	59
	• S1	20	30	22	22	34	36	6	8	178

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin								JML
		DIN	JP	JU	JT	JS	JB	PS	UPT	
	• Diploma	14	5	2	5	5	2	1	6	40
	• SLTA	16	21	22	36	28	43	4	4	174
	• SLTP	1	3	-	1	2	-	1	-	8
	• SD	-	-	-	-	1	1	-	-	2

Sumber : Dinas Dukcapil Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.86
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklat-pim	Pangkat
1	Dinas					
	a) Eselon II	1	1	1	1	1
	b) Eselon III	5	5	5	5	5
	c) Eselon IV	16	16	16	15	16
2	Sudin Jakpus					
	d) Eselon III	1	1	1	1	1
	e) Eselon IV	12	12	12	6	12
3	Sudin Jakut					
	f) Eselon III	1	1	1	1	1
	g) Eselon IV	10	10	10	6	10
4	Sudin Jakbar					
	h) Eselon III	1	-	-	-	-
	i) Eselon IV	12	12	12	5	12
5	Sudin Jaksel					
	j) Eselon III	1	1	1	1	1
	k) Eselon IV	14	13	13	8	13
6	Sudin Jaktim					
	l) Eselon III	1	1	1	1	1
	m) Eselon IV	14	13	13	8	15
7	Sudin Kep Seribu					
	n) Eselon III	1	1	1	1	1
	o) Eselon IV	5	5	5	5	5
8	UPDAK					
	p) Eselon III	1	1	1	1	1

No	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklat-pim	Pangkat
	q) Eselon IV	1	1	1	-	1
9	UPTIK					
	r) Eselon III	1	1	1	1	1
	s) Eselon IV	1	1	1	1	1
	JUMLAH					
	t) Eselon II	1	1	1	1	1
	u) Eselon III	13	12	12	12	12
	v) Eselon IV	85	83	83	54	85
	TOTAL	99	96	96	67	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2017

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : C / B = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : D / B = 70 %
- Kepangkatan : E / B = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas, UPT dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2018 sebesar Rp291.366.362.809,-.

Tabel 3.87
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KEPENDUDUKAN Dan CATATAN SIPIL	268.102.288.794	228.629.365.749	85,28%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	195.646.678.800	169.175.584.309	86,47%
2. BELANJA LANGSUNG	72.455.609.994	59.453.781.440	82,06%
a. BELANJA PEGAWAI	218.500.000	26.050.000	11,92%
b. BELANJA BARANG DAN JASA	64.969.082.744	53.830.386.864	82,86%
- Belanja Pemeliharaan	2.374.693.022	2.119.395.220	89,25%
c. BELANJA MODAL	7.268.027.250	5.597.344.576	77,01%
CATATAN PERBBANDINGAN :	-	-	-
Alokasi Anggaran URUSAN :		61.821.923.000.480	0,43%

Belanja APBD	268.102.288.794		
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	5.597.344.576	228.629.365.749	2,45%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	2.119.395.220	53.830.386.864	3,94%
Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	2.119.395.220	228.629.365.749	0,93%

Sumber : Monev 2017, Bappeda Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.88
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin							Jumlah
		DIN	JP	JU	JB	JS	JT	PS	
1	Kotak Pengaduan	1	53	1	1	1	1	-	58
2	Leaflet, Booklet, Buku Saku	15.000	200	1.450	400	1.200	-	-	18.250
3	Mobil Operasional Keliling	1	3	3	3	3	3	-	16
4	Motor Operasional Keliling	18	43	30	56	66	62	-	275
5	Pengumuman di Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Website	1	-	-	-	-	-	-	1
7	Video Wall	-	-	-	-	-	1	-	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

CATATAN PERBANDINGAN :

Website : witter : @dukcapilJakpus @dukcapiljakbar

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar berupa alat-alat elektronik pengolah dan penyimpan data, berupa Personal Computer (PC), Server dan peralatan komputerisasi

lainnya, serta alat-alat pendukung produk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan pelayanan administrasi yang bersifat dasar, oleh karena itu kegiatannya bersifat *top down*. Meskipun demikian, forum Musrenbang tetap dilalui dalam proses perencanaan.

Tabel 3.89
Sikronisasi Perencanaan Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	3	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	3	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	3	DPA : DPA-P	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

h. Permasalahan dan solusi

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sejumlah 99,42 Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 97,12 %. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah semakin sadar pentingnya Dokumen Kependudukan.
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah 98,42%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 97,96% Meskipun meningkat, jumlah ini belum memenuhi target tahun 2018 sebesar 100% dikarenakan adanya warga yang masih belum merekam data KTP-el karena pindah tanpa lapor maupun masih berada di luar negeri.
3. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2018 berjumlah 73,30%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya dengan persentase 83,79%, dikarenakan target cakupan kepemilikan mengalami peningkatan,

apabila sebelumnya hanya untuk usia dibawah 1 tahun (bayi), saat ini target tersebut naik ke usia anak yaitu 0-18 tahun.

4. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2018 berjumlah 100%. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase 99,99%, dikarenakan masyarakat sudah semakin sadar pentingnya Dokumen Kependudukan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.90
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan	Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3		Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan
4		Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Tidak memiliki Surat Keterangan Kelahiran

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

Data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta per-31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.91
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Per-31 Desember 2018

WILAYAH KOTA	WNI			WNA			TOTAL		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
KAB.ADM.KEP. SERIBU	14.260	14.029	28.289	-	-	-	14.260	28.289	28.289
JAKARTA PUSAT	577.965	567.604	1.145.569	516	372	888	578.481	1.146.457	1.146.457
JAKARTA UTARA	900.360	880.361	1.780.721	652	509	1.161	901.012	1.781.882	1.781.882
JAKARTA BARAT	1.256.881	1.228.343	2.485.224	503	347	850	1.257.384	2.486.074	2.486.074
JAKARTA SELATAN	1.151.693	1.143.086	2.294.779	1.492	706	2.198	1.153.185	2.296.977	2.296.977
JAKARTA TIMUR	1.568.451	1.543.112	3.111.563	238	127	365	1.568.689	3.111.928	3.111.928
DKI JAKARTA	5.469.610	5.376.535	10.846.145	3.401	2.061	5.462	5.473.011	10.851.607	10.851.607

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, 2018

10. Ketenagakerjaan

a. Prioritas urusan

1. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis
3. Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
5. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Ketenagakerjaan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.92
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Ketenagakerjaan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitaas	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
4	Pengembangan Hubungan Industrial Dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis
5	-	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
6	-	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
Jml	4	5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

Program Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta menyatu dengan Program Ketransmigrasian, karena dilaksanakan oleh Dinas yang sama, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tabel 3.93
Program Urusan Ketenagakerjaan

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	150
2.	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	8
3.	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan	5
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja	167
5.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja	27
	Jumlah	**357**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Hasil yang dicapai pada Tahun 2018 dalam urusan ketenagakerjaan (dan ketransmigrasian) sebagai berikut.

Tabel 3.94
Realisasi Program Urusan Ketenagakerjaan

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	150	150	100,00
2.	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	8	8	100,00
3.	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan	5	5	100,00
4.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja	167	167	100,00
5.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja	27	27	100,00
	Jumlah	**357**	**357**	**100,00**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

Capaian hasil kegiatan urusan ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut :

d. Program Pembinaan dan Penempatan Tenagakerja

- Jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2018 tercatat 5.041.260 orang, bertambah 185,500 orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 4.856.116 orang.
- Jumlah penduduk yang bekerja di DKI Jakarta pada Agustus 2018 sebesar 4.726.780 orang, bertambah 217.610 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017 sebanyak 4.509.171 orang.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada Agustus 2018 sebesar 6,24 persen, mengalami penurunan sebesar 0,9 poin persen bila dibandingkan TPT keadaan Agustus 2017 sebesar 7,14 persen. Secara absolut jumlah penganggur mengalami penurunan sebanyak 32.100 orang, dari 346.945 orang pada Agustus 2017 menjadi 318.840 ribu orang pada

Agustus 2018

- Penduduk bekerja keadaan Agustus 2018 di DKI Jakarta menurut lapangan kerja utama menunjukkan bahwa tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil, yaitu 1.170.000 orang, disusul oleh sektor jasa lainnya dan real estate sebanyak 672.000 orang.
- Pada Agustus 2018, status pekerjaan pekerja yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 3.103.604 orang (65,66%) diikuti berusaha sendiri sebesar 930.703 orang (19,69%), dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebesar 196.635 orang (4,16%) dan penduduk yang bekerja dengan status bebas pekerja pertanian sebesar 2.364 orang (0,05%).
- Pada bulan Agustus 2018 penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 3.300.100 (69,82%), sedangkan 1.426.680 orang (30,18%) bekerja pada sektor informal.
- Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2018, sebanyak 4.120.000 orang (87,16%) bekerja 35 jam atau lebih per minggu, sedangkan yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam per minggu sebesar 50.000 orang (1,05%).
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,98 poin, yaitu dari 61,97 persen pada Agustus 2017 menjadi 63,95 persen pada Agustus 2018. TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,98 poin, yaitu dari 61,97 persen pada Agustus 2017 menjadi 63,95 persen pada Agustus 2018. TPAK perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 2,91 poin, yaitu dari 78,48 persen pada Agustus 2017 menjadi 48,47

persen pada Agustus 2018.

- Pada Agustus 2018, penduduk yang bekerja yang berpendidikan tinggi 1.210.000 orang (25,58%), terdiri dari Universitas/S1 sebanyak 930.000 orang, Diploma 279.000. Pendidikan SMA sederajat 2.000.000 orang (42,29%). Pendidikan SMP kebawah 1.520.000 orang (32,13%).
- Pada Agustus 2018 Pengangguran yang berpendidikan Universitas sebanyak 15.144 orang (4,81%), Diploma 15.144 orang (4,81%), SMA 25.470 orang (8,09%), SMK 30.382 orang (9,65%), SMP 15.773 orang (5,01%) dan SD sebanyak 8.658 orang (2,75%). Pengangguran terbanyak menurut pendidikan adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Secara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Selama periode Agustus 2017 – Agustus 2018, mengalami penurunan dari 7,7 persen menjadi 6,24 persen, atau turun sebesar 0,9 poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki laki mengalami penurunan, dari 7,17 persen menjadi 6,65 persen, sementara TPT perempuan mengalami penurunan dari 7,09 persen menjadi 5,58 persen.
- Program pembinaan dan penempatan tenaga kerja adalah program yang berupaya untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Secara umum Program pembinaan dan penempatan tenaga kerja adalah salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di DKI Jakarta

DATA PENCARI KERJA,LOWONGAN & PENEMPATAN YANG TERDAFTAR TAHUN 2018
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

NO	KOTAMADYA/KABUPATEN	PENCARI KERJA			LOWONGAN			PENEMPATAN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KOTA JAKARTA SELATAN	1077	1045	2122	3401	1678	5079	1895	1185	3080
2	KOTA JAKARTA TIMUR	3287	2538	5825	2512	1605	4117	2432	1541	3973
3	KOTA JAKARTA PUSAT	2858	2659	5517	2201	2211	4412	2641	2287	4928
4	KOTA JAKARTA BARAT	3156	2177	5333	2979	2093	5072	2752	1890	4642
5	KOTA JAKARTA UTARA	1743	2094	3837	1532	2190	3722	1259	1807	3066
6	KOTA KEPULAUAN SERIBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.121	10.513	22.634	12.625	9777	22.402	10.979	8710	19.689

Rincian Penempatan Tenaga Kerja		
1	Pelayanan Antar Kerja	18.944
2	PPKD	3.304
3	AKAN	412
4	AKAD	27
5	AKL	51
6	WUB	1.304
7	BKK	-
	Total Penempatan	**24.042**

Data Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	
Pencaker	26.514
Target Penempatan	21.000
Penempatan	24.042
% Serapan Lakip	114,48%

Jumlah Pencari Kerja yang mengakses info lowongan kerja	
Jakarta Barat	5.333 Orang
Jakarta Pusat	5.517 Orang
Jakarta Selatan	2.122 Orang
Jakarta Timur	5.825 Orang
Jakarta Utara	3.837 Orang
Dinas	63 Orang
Total	**22.697 Orang**

- Terlaksananya Penempatan Tenaga kerja sebanyak 24.042 orang dari target 21.000 orang atau sebesar 114,48%;
- Terlaksananya penciptaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang berasal dari pencari kerja sebanyak 2.143 orang dari target 1.037 orang atau sebesar 206,65%;
- Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita sebanyak 75 orang
- Terlaksananya Perluasan Jejaring Kios 3in1 dan Pemagangan ke 700 perusahaan
- Tahun 2018 telah dihasilkan Terlaksananya pelatihan kerja di 7 (tujuh) Pusat Pelatihan Kerja sebanyak 7.200 orang,
- Tahun 2018 telah dihasilkan Terlaksananya pelatihan Satuan Pengamanan sebanyak 400 orang
- Tahun 2018 telah dihasilkan terlaksananya Pelatihan Pengemudi SIM A sebanyak 1.630 orang,
- Tahun 2018 telah dihasilkan terlaksananya pelatihan kerajinan tangan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 200 orang.
- Tahun 2018, berhasil melatih 720 orang dalam hal peningkatan produktivitas tenaga kerja

e. Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis

- Tahun 2018 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.940.973,- yang sebelumnya tahun 2017 sebesar Rp. 3.648.035,-
- Jumlah Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) tahun ditahun 2018 berjumlah 3.627 SP/SB meningkat 110 SP/SB di bandingkan tahun 2017 berjumlah 3.517 SP/SB .
- Federasi Serikat pekerja tahun 2018 berjumlah 144 federasi Serika pekerja bertambah 1 federasi dibandingkan tahun 2017 berjumlah 143 Federasi.

- Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tahun 2018 berjumlah 7 konfederasi pekerja, tetap dibandingkan tahun 2017 berjumlah 7 konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit pada tahun 2018 berjumlah 995 perusahaan, bertambah 138 perusahaan dibandingkankan tahun 2017 berjumlah 857 Perusahaan.
- Peraturan Perusaan (PP) ditahun 2018 berjumlah 8.028 PP dibandingkan tahun 2017 berjumlah 6.389 PP mengalami peningkatan sebesar 1.639 PP.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ditahun 2018 berjumlah 746 PKB dibandingkan ditahun 2017 berjumlah 676 PKB, mengalami peningkatan sebesar 70 PKB.
- Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan aktif tahun 2018 berjumlah 101.619 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 5.038.193 pekerja, dibandingkan ditahun 2017 berjumlah 95.828 perusahaan, 4.893.575 pekerja.
- Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Perselisihan HAK ditahun 2018 berjumlah 720 kasus, perselisihan Kepentingan 118 kasus.
- Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2018 sebanyak 2.967 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 9.592 orang.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian bersama (PB) sebanyak 282 kasus
- Mogok Kerja di tahun 2018 di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	KOTA	JUMLAH KASUS	T.K TERLIBAT
a.	JAK-BAR	1 KASUS	300 Org
b.	JAK-TIM	1 KASUS	282 Org

c.	JAK-PUS	10 KASUS	618 Org
d.	JAK-UT	19 KASUS	5.920 Org
e.	JAK-SEL	5 KASUS	1.330 Org
Total		34 KASUS	8.450 Org

f. Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan

- Tahun 2018 telah dihasilkan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di Tempat Kerja sebanyak 3.872 Perusahaan
- Tahun 2018 telah dihasilkan Terlaksananya pemeriksaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja sebanyak 2.617 Perusahaan
- Tahun 2018 telah dihasilkan layanan pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja pada tahun sebanyak 14 Pelatihan.
- Tahun 2018 telah dihasilkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebanyak 5.000 orang

g. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagian dari pegawai tersebut juga melaksanakan urusan ketransmigrasian.

Tabel 3.95
Rekapitulasi Pegawai Urusan Ketenagakerjaan

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**466**	
	1. Golongan IV	95	
	2. Golongan III	343	
	3. Golongan II	27	
	4. Golongan I	1	
B.	**Eselon**	**466**	
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	3. Eselon III	14	
	4. Eselon IV	36	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	192	
	7. Pelaksana (Staf)	223	
C.	**Pendidikan**	**466**	
	1. S3	1	
	2. S2	58	
	3. S1	268	
	4. Diploma	23	
	5. SLTA	110	
	6. SLTP	3	
	7. SD	3	

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.96
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Ketenagakerjaan

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	19	14	14	14	14
3	Eselon IV	44	36	36	34	36
Jumlah		64	51	51	49	49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan :

- Tingkat Pendidikan : 51 / 51 = 100,00 %
- Diklat Kepemimpinan : 49 / 51 = 96,07 %
- Kepangkatan : 49 / 51 = 96,07 %

h. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.97
Alokasi dan Realisasi Urusan Ketenagakerjaan

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN WAJIB (KETENAGAKERJAAN)	335.057.326.790	304.485.095.723	90,87%
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	198.741.064.000	190.235.509.014	95,72%
2. BELANJA LANGSUNG	136.316.262.790	114.249.586709	83,81%
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA	99.276.410.134	82.071.281.044	82,67%
Belanja Pemeliharaan	3.633.168.495	3.518.531.164	96,84%
c. BELANJA MODAL	37.039.852.656	32.178.305.665	86,87%
CATATAN :			
Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	335.057.326.790	304.485.095.723	90,87%
BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	37.039.852.656	32.178.305.665	86,87%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang Jasa	3.633.168.495	3.518.531.164	96,84%
Belanja Pemeliharaan : Belanja Pegawai			

Sumber : LKPD 2018 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

i. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Ketenagakerjaan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.98
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Ketenagakerjaan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	10	17
2.	Kotak Pengaduan	1	1	1	1	1	1	1	10	17
3.	Leaflet	4	4	4	4	4	4	4	10	38

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	J P	J U	J T	J S	J B	K P	UPT	
4.	Mobil Keliling	0							10	10
5.	Media Masa	4	2	2	2	2	2	2	20	36
6.	Website	1								1
7.	E-mail	2	1	1	1	1	1	1	10	18

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

Catatan :

- Website : disnakertrans.jakarta.go.id
- E-mail : disnakertrans@jakarta.go.id, bidang.program@gmail.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana pendukung peningkatan kualitas ketenagakerjaan khususnya yang berupa UPT.

Tabel 3.99
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Pusat Pelatihan Kerja Daerah	5
2	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las Condet	1
3	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI)	1
4	Pusat Higiene Perusahaan, kesehatan dan Keselamatan Kerja	1
5	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D)	1
Jumlah		9

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

j. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan tidak hanya yang dibiayai oleh APBD tetapi juga terdapat kegiatan yang dibiaya oleh APBN melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kegiatan dari APBD direncanakan melalui forum Musrenbang yang dipandu oleh Bapeda, sementara kegiatan APBN merupakan penjabaran dari program pemerintah.

Tabel 3.100
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Ketenagakerjaan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2017	5	RENJA SKPD : RKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2017	5	RKA : RENJA SKPD	100,00
3	RKA 2017	5	DPA : RKA	100,00
4	DPA 2017	8		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

k. Permasalahan dan solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Jumlah pegawai fungsional tertentu yang terus berkurang, yaitu Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Instruktur di Pusat Pelatihan Kerja;
- Instruktur, kurikulum dan sarana prasarana pelatihan kerja yang belum berbasis kebutuhan SDM Dunia Usaha Dunia Industri;
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan;
- Masih rendahnya pemahaman Perusahaan dan Serikat Pekerja mengenai hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja;
- Ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan;
- Laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja. Disebabkan karena Jakarta sebagai ibukota diminati oleh para pencari kerja dari daerah dan luar negeri. Hal ini sangat berbahaya, karena akan meningkatkan pengangguran jika tidak

dibarengi oleh kesempatan kerja yang meningkat dan peningkatan kompetensi para pencari kerja;

- Rendahnya semangat/ motivasi pencari kerja dalam persaingan dipasar kerja. Banyak pencari kerja yang tidak bersedia di tempatkan perusahaan yang jauh dari tempat tinggalnya;
- Kerjasama antara Disnakertrans dengan Dunia Usaha Dunia Industri belum optimal, di bidang ketenagakerjaan

Solusi yang telah ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut diatas adalah melalui:

- Mengusulkan penambahan formasi untuk pegawai fungsional tertentu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan menambah jumlah instruktur non PNS
- Revitalisasi pada Pusat Pelatihan Kerja (PPK) maupun Pusat Pelatihan Kerja PPK / PPKD di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pembenahan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja terus dilakukan dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja baik untuk Pengusaha dan Pekerjanya.
- Meningkatkan pembinaan pelaksanaan PP, PK, PKB agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja untuk mengurangi terjadinya perselisihan hubungan industrial
- Meningkatkan keahlian dan ketrampilan pencari kerja, dengan memberikan layanan pelatihan

kerja gratis baik menggunakan metode reguler maupun dengan menggunakan metode Mobile Training Unit (MTU);

- Meningkatkan kesempatan kerja dengan memberikan informasi lowongan kerja yang update dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam oleh perusahaan;
- Meningkatkan motivasi dan produktivitas pencari kerja dengan pelatihan peningkatan produktivitas;
- Mengajak peran serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam penentuan kurikulum pelatihan dan pengembangan instruktur, sarana dan prasarana pelatihan kerja

I. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Urusan Ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.101 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Ketenagakerjaan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	- Perda 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah	1. Pergub Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 339 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Produktivitas; 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 340 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri; 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Khusus Ibukota Jakarta Nomor 341 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 342 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las; 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 343 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 7. Pergub Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018;

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta 2018

11. Ketahanan Pangan

a. Prioritas Urusan

Program Prioritas Urusan Ketahanan Pangan adalah :

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Ketahanan Pangan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.102
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi
Urusan Ketahanan Pangan

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi / pemasaran
Jml	**1**	**1**

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

Program Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Pertanian sebanyak 3 program 165 kegiatan. Adapun program Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.103
Program Urusan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Pertanian

No.	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	37
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	104
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	24
	Total	165

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kinerja program dan kegiatan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.104
Realisasi Program Urusan Ketahanan Pangan
Dinas Kelautan dan Pertanian

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	37	37	100
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	104	104	100
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	24	24	100
	Total	165	165	100

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

Adapun capaian persentase pada indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Persentase Ketersediaan Pangan sebanyak 100 % sama seperti capaian pada tahun 2017, sedangkan untuk Skor Pola

Pangan Harapan pada tahun 2018 tercapai 86,5 meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu 83,7.

Target Realisasi Capaian dan Perbandingan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan pangan						
	Persentase Ketersediaan Pangan	100%	100%	100	100%	100%	100
	Skor Pola Pangan Harapan	81	83,7	100	81	86,5	100

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

Persentase Ketersediaan Pangan

Target Kebutuhan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Komoditas	Target Pangan (Kg/Kp/Th)	Realisasi Kebutuhan Pangan (Kg/Kp/Th)	Ketersediaan (Kg/Kp/Th)	%
1.	Beras	88.1	81.21	128.91	158.7
2.	Daging Ruminansia	11.1	6.75	39.05	578.5
3.	Daging Unggas	19.1	11.68	13.27	113.6
4.	Telur	6.5	8.8	139.04	1580
5.	Susu	13.2	5.22	238.71	4572.9
6.	Ikan	14.2	23.1	54.41	235.5
7.	Gula	8.2	6.83	57.85	846.9
8.	Sayur	48.6	44.42	74.47	167.6
9.	Buah	38.4	27.38	37.71	137.7

Berdasarkan Tabel di atas, maka ketersediaan pangan strategis telah mencapai lebih dari 100 % dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta. Data ini menggambarkan bahwa meskipun produksi pangan di DKI Jakarta sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pangan

penduduk DKI Jakarta, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para stakeholdernya, maka kebutuhan pangan dapat terpenuhi lebih dari 100%. Dengan demikian upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar terus ditingkatkan sehingga pasokan pangan tetap terjaga, harga stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta.

Perkembangan skor PPH DKI Jakarta (AKE 2000 kkal/kap/hari)
Tahun 2012-2017

No	Kelompok Pangan	Tahun						Skor pph ideal
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Padi-padian	22,8	25	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	0,5	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	2,5
3	Pangan Hewani	24	24	24	24	24	24	24
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	5	5	5	5
5	Buah/Biji Berminyak	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	1
6	Kacang-Kacangan	7,2	7,2	7,2	5,4	5,6	6,3	10
7	Gula	1	1,5	1,5	1,5	1,9	1,8	2,5
8	Sayur dan Buah	23	21,5	24,3	21,8	21,2	22,9	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**85,4**	**84**	**85**	**88,1**	**83,7**	**86,5**	**100**

Berdasarkan analisa terhadap situasi konsumsi pangan dan pola pangan penduduk di DKI Jakarta, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pola konsumsi pangan penduduk di DKI Jakarta cukup beragam namun belum memenuhi standar ideal keberagaman pangan
b. Konsumsi pangan yang sudah memenuhi standar ideal Pola Pangan Harapan (PPH)meliputi padi, pangan hewani, minyak dan lemak
c. Pangan yang belum memenuhi standar ideal Pola Pangan Harapan meliputi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, dengan jumlah pegawai 227 orang (termasuk di dalamnya Suku Dinas dan UPT).

Tabel 3.105
Rekapitulasi Pegawai Urusan Ketahanan Pangan

No.	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
A.	**Golongan**	**42**	**15**	**2**	**9**	**16**	**9**	**3**	**131**	**227**
	• Golongan IV	2	3		1	3	2	1	9	**21**
	• Golongan III	29	10	2	3	10	7	2	96	**159**
	• Golongan II	9	2		5	3			26	**45**
	• Golongan I	2								**2**
B.	**Eselon**	**42**	**15**	**2**	**9**	**16**	**9**	**3**	**131**	**227**
	• Eselon II									**0**
	• Eselon III	1	1			1			3	**6**
	• Eselon IV	5	2			1	1	1	4	**14**
	• Fungsional	4	1		2				38	**45**
	• Staf	32	11	2	7	14	8	2	86	**162**
C.	**Pendidikan**	**42**	**15**	**2**	**9**	**16**	**9**	**3**	**131**	**227**
	• S3									**0**

No.	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas/Sudin/UPT								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	Kep. 1000	UPT	
	• S2	5	3			4	1	1	8	**22**
	• S1	24	7	2	4	4	3		35	**79**
	• Diploma	1					1		9	**11**
	• SLTA	11	5		4	7	4	2	70	**103**
	• SLTP	1			1	1			4	**7**
	• SD								5	**5**

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.106
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Ketahanan Pangan

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Dinas					
	• Eselon II					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	5	5	5	5	5
2	Sudin Jakpus					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
3	Sudin Jakut					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	2	2	2	2	2
4	Sudin Jaktim					
	• Eselon III					
	• Eselon IV					
5	Sudin Jaksel					
	• Eselon III	1	1	1	1	1
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
6	Sudin Jakbar					
	• Eselon III					
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
7	Sudin Kep. Seribu					
	• Eselon III					

No.	SKPD	Jumlah Jabatan	Jabatan Yang Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
	• Eselon IV	1	1	1	1	1
8.	UPT					
	• Eselon III	3	3	3	2	3
	• Eselon IV	4	4	4	4	4
	JUMLAH					
	• Eselon II					
	• Eselon III	6	6	6	5	6
	• Eselon IV	14	14	14	14	14
	TOTAL	20	20	20	19	20

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 20 / 20 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 19 / 20 = 95 %
- Kepangkatan : 20 / 20 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan dan Pertanian tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.107
Alokasi Program Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan dan Pertanian

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN URUSAN KETAHANAN PANGAN	52.554.334.078	45.032.959.244	85,69
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	52.554.334.078	45.032.959.244	85,69
a. BELANJA PEGAWAI	-	-	0,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	40.199.909.338	33.158.239.244	82,48
- Belanja Pemeliharaan	2.944.493.336	1.957.364.328	66,48
c. BELANJA MODAL	12.354.424.740	11.874.720.000	96,12

CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD	52.554.334.078	57.365.040.315.366	0,09
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN	11.874.720.000	45.032.959.244	26,37
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa	1.957.364.328	33.158.239.244	5,90
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN	1.957.364.328	45.032.959.244	4,35

Sumber : LKPD 2018 *unreviewed*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Ketahanan Pangan tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana informasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.108
Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Ketahanan Pangan

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin/UPT								Jumlah
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1	1	1	3	10
2.	Website	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	3	10
4.	Call Center	1	1	1	1	1	1	1	3	10

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

Catatan :

Provinsi
- Website : dkpjakarta.web.id
- E-mail : dkp.jakarta@yahoo.com
- Call Center : 021 6285277, 021 6007251

Jakarta Pusat
- E-mail : tan_hut_jp@yahoo.com
- Call Center : 021 3851854

Jakarta Utara
- E-mail : sudinpertanian@yahoo.com
- Call Center : 021 4358783

Jakarta Timur
- E-mail : sudin_tanhut_jaktim@yahoo.com
- Call Center : 021 4808335

Jakarta Selatan
- Call Center : 021 7205794

Jakarta Barat
- E-mail : sudintanhutjakbar@yahoo.co.id
- Call Center : 021 58356239

Kepulauan Seribu
- E-mail : ikanseribu@yahoo.com
- Call Center : 021 58356239

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasionalisasi Urusan Ketahanan Pangan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.109
Sarana dan Prasarana Urusan Ketahanan Pangan

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian	1
2.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan&Pengujian Mutu Hasil Peternakan	1
3.	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Ketahanan Pangan merupakan gabungan *bottom up* dan *top down* planning, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan Perencanaan Daerah.

Tabel 3.110
Sinkronisasi Perencanaan Program Urusan Ketahanan Pangan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	3	RENJA SKPD : RKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2018	3	RKA : RENJA SKPD	100,00
3	RKA 2018	3	DPA : RKA	100,00
4	DPA 2018	3		

Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

h. Permasalahan dan solusi

- DKI Jakarta dengan penduduk yang besar merupakan daerah potensial tujuan pemasaran, sehingga kekurangan akan ketersediaan pangan dapat diatasi. Namun masih terdapat warga yang belum mampu mencukupi kebutuhan dasarnya tersebut dengan baik. Oleh sebab itu perlu

pembinaan dan bantuan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Untuk memantau kualitas pasokan bahan pangan yang masuk ke DKI Jakarta perlu dibuat Agro Check Point.
- Suplai produk hasil pertanian berasal dari luar Jakarta, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan daerah produsen.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan poenduduk diantaranya meliputi:

1. Peningkatan produksi pangan di DKI Jakarta baik produk pertanian, peternakan maupun perikanan.

   Peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan program Urban Farming atau pertanian perkotaan, peningkatan produksi peternakan dengan meningkatkan produksi susu dan peningkatan produksi perikanan dengan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
2. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah yang mengurusi pangan

   BUMD yang terlibat pada urusan pangan meliputi PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Ketiga BUMD inilah yang aktif melakukan usaha baik trading (perdagangan), kerja sama penyediaan pangan maupun mendukung program-program ketahanan pangan.
3. Kerja sama penyediaan pangan

   Kerja sama penyediaan pangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dengan daerah mitra dalam bentuk MoU. Adapun proses bisnisnya ditindaklanjuti oleh BUMD

4. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga pasokan dan ketersediaan pangan diantaranya dilakukan oleh Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan. Program ini dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi termasuk BUMD. Diantara kebijakan pemerintah pusat yang terkait langsung dengan ketersediaan pangan di DKI Jakarta adalah kuota impor pangan dan penetapan harga acuan untuk pangan strategis.

Untuk mencapai standar ideal pola konsumsi pangan sesuai dengan Skor PPH, hal-hal yang perlu dilakukan sebagaimana berikut:

No	Kelompok Pangan	Arah Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1	Sumber Karbohidrat	- Menurunkan konsumsi beras. - Meningkatkan konsumsi aneka umbi-umbian sebagai substitusitepung terigu - Penerapan teknologi pengolahan umbi-umbian menjadi aneka produk seperti mie, cake, kue basah, kue kering, dan lain-lain untuk menciptakan pasar pangan lokal umbi-umbian
2	Sumber Protein Hewani	- Mempertahankan konsumsi daging unggas, daging ruminansia, susu dan olahannya.
3	Sumber Protein Nabati	- Meningkatkan konsumsi kacang-kacangan dan olahannya seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah
4	Sumber Vitamin Mineral	- Meningkatkan konsumsi buah. - Mempertahankan konsumsi sayuran

- Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Ketahanan Pangan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.111 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Ketahanan Pangan

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2	Keputusan menteri Pertanian No. 481/KPTS/OT.2210/5/98 tentang Penerapan Standarisasi Komoditas Hasil Pertanian	Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan keamanan Komoditas Hasil pertanian

Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

- Pasokan bahan pangan ke DKI Jakarta dan juga beberapa daerah lain berpusat di beberapa pasar induk yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Pasar Induk Kramat Jati (sayuran dan buah-buahan) dan Pasar Induk Beras Cipinang. Pasokan bahan pangan tersebut dapat dipantau baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga.

Pada tahun 2017 Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 88.

- Untuk meningkatkan mutu hasil perikanan masih menghadapi kendala seperti penggunaan bahan kimia berbahaya,penerapan PMMT masih rendah dan sarana/prasarana belum memadai. Usaha-usaha peningkatan mutu hasil perikanan terus dilakukan melalui penyediaan sarana/prasarana sesuai standard mutu, penerapan penanganan/ pengolahan yang baik, pengawasan/pemeriksaan melalui pengujian mutu hasil perikanan, termasuk dilakukan oleh unit pengujian mutu lebih memantapkan kompetensi dan otoritasnyta sebagai lembaga yang diberi tanggungjawab untuk melakukan sertifikasi hasil perikanan untuk dikonsumsi manusia. Pemantapan kompetensi tersebut mengacu pada ISO 17025, ISO 17020 dan ISO 19011.

Pencapaian RPJMD tahun 2018

Program	Indikator Program	Satuan	IKU 2018		Keuangan	
			Target	Capaian	Target	Capaian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	100	100	3.845.419.220	2.841.941.392
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	%	95	95	41.663.932.027	36.900.709.918
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	59.320.383.958	51.343.903.844
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	2.021.750.304	1.594.871.020

Sumber : Dinas Ketahan Pangan dan KP Prov. DKI Jakarta 2018

12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Prioritas urusan

Terdapat 2 (dua) Program Prioritas Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 yang dilaksanakan di 1 (satu) SKPD dan 6 (enam) UKPD 6 (enam) Sudin PPAPP Kab/Kota Adm, yaitu :

- Program Perlindungan Perempuan dan anak
- Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

b. Program dan kegiatan

Program nasional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.112
Perbandingan Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Forum Anak	Program Perlindungan Perempuan dan anak
2	Kota Layak Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Jml	**2**	**2**

Pada tahun anggaran 2018 terdapat 2 program dengan 7 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.113
Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1	Program Perlindungan Perempuan dan anak	4	103.140.000	96,54
2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	65.556.500	99,02
Jumlah		**7**	**168.696.500**	**97,49**

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta 2018

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Pencapaian kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTahun 2018 sebesar 97,49%.

Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018	%
1	Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	0	1.217	74,34%	100
2	Jumlah kekerasan perempuan dan anak	0	100%	1.769	100
3	Jumlah kota/kabupaten layak anak mendapatkan predikat madya	0	0	2	200
4	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Pengnggaran Responsif Gender (PPRG)	24%	6 SKPD (14,26%)	17 SKPD (47%)	

Tabel 3.114
Realisasi Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi	%
1	Program Perlindungan Perempuan dan anak	4	4	100
2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	3	100
	Jumlah	**7**	**7**	**100**

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang. Dimana sebagian pegawai tersebut juga melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan keluarga berencana Rincian pegawai sebagai berikut :

Tabel 3.115
Rekapitulasi PegawaiUrusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**45**	
	• Golongan IV		
	• Golongan III		
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	**Eselon**	**45**	
	• Eselon I		
	• Eselon II		
	• Eselon III	1	
	• Eselon IV	10	
	• Eselon V		
	• Fungsional Khusus		
	• Fungsional Umum (staf)	34	
C.	**Pendidikan**	**45**	
	• S3		
	• S2		
	• S1		
	• Diploma		

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : DPPAPP, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.116
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	2	1	1	1	1
3	Eselon IV	10	10	10	9	10
	TOTAL	12	11	11	10	11

Sumber : DPPAPP 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 11 / 11 = 100 %
- Diklat Kepemimpinan : 10 / 11 = 97,5 %
- Kepangkatan : 11 / 11 = 100 %

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melekat pada Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.117
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
ANGGARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dan PERLINDUNGAN ANAK	173.045.000	168.696.500	97,45
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG	173.045.000	168.696.500	97,45
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN			

URAIAN	ALOKAS (Rp)	REALISASI (Rp)	%
JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : APBD			
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.118 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pos Pengaduan	0	2	2	3	2	3	0	0	12
3.	Leaflet	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500
4.	Stiker	2.940	0	0	0	0	0	0	0	2.940
5.	Mobil Keliling	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	Spanduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Media Masa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Website	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9.	E-mail	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10.	Roll Banner	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPPAPP 2018

CATATAN PERBANDINGAN : PERBBANDINGAN

Website : http://dkijakarta.bkkbn.go.id/

Tabel 3.119
Jenis Sarana dan Prasarana DPPAPP

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor P2TP2A	1
2.	Mobil Keliling Perlindungan Anak	1
3.	Motor Keliling Perlindungan Anak	1

Sumber : DPPAPP 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terpadu dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih banyak bersifat top down, namun dalam implementasinya banyak melibatkan masyarakat secara langsung baik melalui kelembagaan maupun individu.

Tabel 3.120
Sinkronisasi Perencanaan Program
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	2	RENJA SKPD : RKPD	100,00
2	RENJA SKPD 2018	2	RKA : RENJA SKPD	100,00
3	RKA 2018	2	DPA : RKA	100,00
4	DPA 2018	2		

Sumber : BPMPKB 2018

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta solusinya antara lain :

Permasalahan :

Masih belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah daerah.

Solusi :

Menyiapkan perencanaan Program yang responsif Gender dengan program Permuliaan Terhadap perempuan dan Anak yang dituangkan dalam Kegiatan Strategis daerah No.13 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan Dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat Dan Rumah Aman.

Permasalahan :

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO dan masih perlu ditingkatkanya kualtias peangangan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO.

Solusi :

a. Mengoptimalkan jejaring dengan Mitra Kerja dalam pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Optimalisasi Call Centre 112.
b. Meningkatkan Kerja sama Mitra Praja utama dengan 10 provinsi untuk masalah penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak lintas provinsi termasuk human *trafficking.*
c. Mendekatkan akses masyarakat untuk melaporkan kasusnya dengan membentuk PO Pengaduan KtP dan KtA di 12 Lokasi

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Peraturan Menteri/peraturan yang berkaitan dengan urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 3.121
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
2.	Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah.	Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah	1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		2) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 630 Tahun 2010 Pembentukan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
		3) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
5	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
		Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.
		Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
		Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
		Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2018, yaitu :

- Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 kategori Madya Pemerintah Kota Jakarta Timur.
- Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 kategori Madya Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
- Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 kategori Pratama Pemerintah Kabupaten Kepualauan Seribu.
- Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 kategori Pratama Pemerintah Kota Jakarta Barat
- Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 Kategori Pratama diberikan kepada Kota Jakarta Timur.
- Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 Kategori Pratama diberikan kepada Kota Jakarta Barat.
- Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2018 Kategori Madya diberikan kepada Kota Jakarta Utara.
- Penghargaan Parahita Eka praya Untuk Kategori UTAMA untuk pemprov DKI Jakarta
- Penghargaan diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai Insiator Pembentukan UPTD PPA.
- Penghargaan diberikan kepada MTSN 13 Jakarta sebagai Sekolah Ramah Anak Terbaik Tingkat MTS Tahun 2018

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Prioritas urusan

Terdapat 1 Program Prioritas Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2018 di DKI Jakarta, yaitu :

1) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Program dan kegiatan

Program Nasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.122 Program Nasional dan Program Provinsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	PROGRAM	
	NASIONAL	PROVINSI
1	Pelayanan KB	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	
3	Pembinaan Remaja	
4	Pembangunan Keluarga	
5	Regulasi, Kelembagaan serta Data dan Informasi	
Jml	5	1

Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2018 melaksanakan 1 (satu) program dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.123
Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Jumlah		

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Jumlah dan Realisasi Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi	%
1.	Penguatan Jaringan Informasi	66.880.000	93,41
2.	Pembekalan Kesehatan Reproduksi pada PUS MUPAR bagi pengelola RPTRA	21.300.000	100
3.	Pelayanan KB Gratis	9.742.409.200	100
4.	Pelayanan KB Melalui Mobil Unit Keliling	10.975.000	95,81
5.	Peningkatan peran Lembaga swasta dalam program keluarga berencana	7.750.000	100
6.	Pembekalan bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan KB MKJP di fasilitas kesehatan	8.400.000	100
7.	Penyelenggaraan akselerasi pelayanan KB MKJP bagi ASFR dan PUS MUPAR di Bidan Praktek Mandiri	10.350.000	100
8.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8.075.000	100
9.	Pelaksanaan Jejering Penyiapan Peralihan Pelayanan KB era JKN	8.400.000	100
10.	Pembekalan kepada kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL),	37.500.000	100
11.	Pembekalan konseling KB paska persalinan dan paska keguguran di fasilitas kesehatan	11.750.000	100
12.	Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Provinsi	48.600.000	100
13.	Pelaksanaan orientasi system pendataan keluarga berbasis teknologi	6.450.000	100
14.	Orientasi pemanfaatan system keluarga (SIGA) nasional tingkat provinsi	5.375.000	100
15.	Penyusunan Renstra 2018-2022	47.320.000	43,96
16.	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	6.450.000	100
17.	Pemutakhiran Road Map Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	6.450.000	100
18.	Pembekalan penyusunan profil kependudukan	12.900.000	100
19.	Pelaksanaan model solusi strategis dampak kependudukan di rusun/RPTRA/kampung KB Tk. Provinsi	61.700.000	100
Jumlah		**10.102.514.200**	**99,69**

c. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Kegiatan dan pencapaian kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut.

Tabel 3.124
Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Age Spesific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	24 per 1000	17,50	16 per 1000
2	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	57,34	59,20	57,75
3	Unmetneed (PUS) yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	14,70	15,70	14,32
4	Persentase keluarga yang terdata	61		54
5	Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	48,50	35	56,20

Sumber DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Tabel 3.125 Data Tingkat Kesejahteraan Keluarga Tahun

No	Kota/ Kabupaten	Tingkat Kesejahteraan					
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III +	Jumlah
1.	Jak. Pusat	-	37.049	75.368	54.620	17.769	**185.166**
2.	Jak. Utara	3.895	49.240	146.215	105.283	32.800	**337.433**
3.	Jak. Timur	8.427	88.195	218.203	180.211	49.799	**544.835**
4.	Jak. Selatan	161	23.322	113.607	151.530	56.592	**345.212**
5.	Jak. Barat	376	50.090	155.334	132.212	43.504	**381.516**
6.	Kep.Seribu	558	1.032	2.744	1.628	5	**5.967**
Jumlah		**13.417**	**249.288**	**711.471**	**625.484**	**200.469**	**1.800.129**

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

d. SKPD yang menyelenggarakan urusan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara fungsional Tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan jumlah pegawai sebanyak 474 orang.

Tabel 3.126
Rekapitulasi Pegawai Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	**Golongan**	**474**	
	• Golongan IV		

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
	• Golongan III		
	• Golongan II		
	• Golongan I		
B.	**Eselon**	**474**	
	• Eselon I		
	• Eselon II		
	• Eselon III		
	• Eselon IV		
	• Eselon V		
	• Fungsional Khusus		
	• Fungsional Umum (staf)		
C.	**Pendidikan**	**474**	
	• S3		
	• S2		
	• S1		
	• Diploma		
	• SLTA		
	• SLTP		
	• SD		

Sumber : BKD Prov. DKI Jakarta, 2018

Pejabat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.127
Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi	Kesesuaian		
				Pendi-dikan	Diklat-pim	Pangkat
1	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	10	10	10	10	10
3	Eselon IV	29	28	28	26	28
	Jumlah	40	39	39	37	39

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

Rekapitulasi Kesesuaian Jabatan dengan

- Tingkat Pendidikan : 39/39 97,50%
- Diklat Kepemimpinan : 37/39 94,87%
- Kepangkatan : 39/39 100%

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi anggaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun anggaran 2018 melekat pada anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga.

Tabel 3.128
Alokasi dan Realisasi Anggaran DPPAPP

URAIAN	ALOKASI (Rp)	RELAISASI (Rp)	%
ANGGARAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEHAT	**10.134.327.800**	**10.102.514.200**	**99,69**
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2. BELANJA LANGSUNG			
a. BELANJA PEGAWAI			
b. BELANJA BARANG DAN JASA			
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL			
CATATAN :			
• Alokasi Anggaran URUSAN : Belanja APBD			
• BELANJA MODAL : Belanja URUSAN			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang & Jasa			
• Belanja Pemeliharaan : Belanja URUSAN			

Sumber : LKPD 2018 *unaudited*, BPKD Prov. DKI Jakarta

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Urusan KB dan Keluarga Sejahtera tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.129 Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada BPMKB/Kantor KB/PMPKB								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
1.	Papan Pengumuman	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Kota Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Leaflet	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Spanduk	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Mobil Keliling	-	1	1	1	1	1	-	-	5

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah Fasilitas pada BPMKB/Kantor KB/PMPKB								Jml
		Prov	JP	JU	JT	JS	JB	KP	UPT	
6.	Media Masa	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Website	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8.	E.mail	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

CATATAN PERBANDINGAN : PERBBANDINGAN :

- Website : ttp://dkijakarta.bkkbn.go.id

Sarana dan prasarana KB dan Keluarga Sejahtera yang berupa gedung dan kendaraan bermotor.

Tabel 3.130 Sarana dan Prasarana DPPAPP

No	Jenis Asset	Jumlah
1.	Gedung BPMP dan KB Provinsi DKI Jakarta	1
2.	Gedung Kantor LPMJ	1
3.	Gedung Diklat KB-KS Prov. DKI Jakarta	1
4.	Gedung Gudang BPMPKB Prov. DKI Jakarta	1
5.	Rumah Dinas Kepala	1
6.	Rumah Dinas Esselon III	6
7.	Gedung Kantor KB Jakarta Pusat	1
8.	Gedung Kantor KB Jakarta Utara	1
9.	Gedung Kantor KB Jakarta Barat (dipinjam KPU)	1
10.	Gedung Kantor KB Jakarta Selatan	1
11.	Gedung Kantor KB Jakarta Timur	1
12.	Kendaraan Dinas (Isuzu Panther)	2
13.	Kendaraan Dinas (Daihatsu Zebra)	1
14.	Kendaraan Dinas (Kijang Super)	1
15.	Kendaraan Dinas (Mitsubishi Colt L300)	1
16.	Kendaraan Pengangkut Barang (Truk/Load Back)	1
17.	Mobil Unit Pelayanan KB	5
18.	Mobil Penerangan dan Motivasi KB	1
19.	Kendaraan Dinas Kantor KB Kota Administrasi	8

Sumber : DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

g. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan secara terpadu dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan terintegrasi antara keterpaduan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning) dan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) karena untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Pusat maupun Daerah.

Tabel 3.131
Sikronisasi Perencanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2018	1	RKPD : RENJA SKPD	100
2	RENJA SKPD 2018	1	RENJA SKPD : RKA	100
3	RKA 2018	1	RKA : DPA	100
4	DPA 2018	1		

Sumber DPPAPP Prov. DKI Jakarta Tahun 2018

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain :

Permasalahan:

Persentase keluarga yang terdata pada tahun 2018 sebanyak 54% atau 88,52% dari target 61%. Hal ini disebabkan oleh transisi sistem aplikasi dari manual berubah menjadi Sistem Pemutakhiran Data Basis Terpadu DKI secara Online (PB DKI) ,sehingga ada penyesuaian cakupan dan sasaran yg terupdate.

Solusi:

Memaksimalkan pendataan dengan sistem aplikasi pada tahun 2019

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

1) Diterimanya Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2018, yaitu :

- Diterimanya Pakarti Madya I kepada Kota Madya Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Sukabumi Utara, dalam Lomba Pelaksana Lingkungan Bersih Sehat (PBS) Kategori Kabupaten-Kota 2018.
- Diterimanya Pakarti Madya I kepada Kota Madya Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tambora dalam Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang.
- Diterimanya Pakarti Madya II kepada Kota Madya Jakarta Pusat, Kecamatan Senen, dalam Pelaksana Terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.
- Diterimanya Pakarti Utama III kepada Kota Madya Jakarta Selatan, Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara, dalam Pelaksana terbaik PHBS Kategori Kabupaten-Kota 2018.
- Diterimanya Pakarti Utama II kepada Kota Madya Jakarta Pusat, Kemayoran, Sumur Batu, dalam Lomba Pelaksana terbaik PKK KKBPK – Kesehatan 2018.
- Juara I Putri Duta Genre Jalur Pendidikan Tingkat Provinsi DKI Jakarta kepada Fellya Zumarnis.
- Juara III Putri Duta Genre Jalur Pendidikan Tingkat Nasional kepada Fellya Zumarnis.
- Diterimanya Manggala Karya Kencana untuk Walikota Jakarta Selatan.
- Penghargaan Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Peringkat II.

Tabel 3.132
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nomor dan Judul Peraturan Dasar Perda/Pergub	Nomor dan Judul Perda/Pergub
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
		Pergub Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana
2	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B.5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan KB	Pergub Nomor 162 Tahun 2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana
3		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahreraan Keluarga
4		Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja